



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini.

Visi dan Misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (RENSTRA), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Pengukuran Kinerja.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LAKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mamuju, Februari 2026

Kepala Dinas



**Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita- citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggung jawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi Instrumen *good governance*. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 ini telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (LAKIP) dan merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun 2025. Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat berjalan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pembangunan bidang Komunikasi, Infformatika, Statistik dan Persandian tentu akan menjadi motivasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk terus berupaya melakukan konsolidasi dan pengembangan pembangunan yang lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA Tahun ke 5), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan. Program kerja tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam periode satu tahun adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju secara umum dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, dimana kegiatan mencapai target dan dapat terealisasi baik fisik maupun keuangan. Secara umum persentase capaian hasil kinerja sasaran yaitu tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 98,80% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Anggaran Belanja pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang bersumber dari APBD sebesar Rp.3.667.347.397,- dengan realisasi sebesar Rp.3.359.615.111,-. Adapun alokasi Belanja Operasional Rp.3.575.601.397.- Realisasi Rp.3.271.328.211.- dan Belanja Modal Rp.91.746.000,- Realisasi sebesar Rp.88.286.900,-.

Dengan telah selesainya seluruh program/kegiatan Tahun 2025 yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia diharapkan output atau keluaran dari hasil seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Mamuju, khususnya bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi sehingga mendukung para pimpinan dalam pemanfaatan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Dasar Hukum 3

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4

1.5. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju 7

1.6. Sumber Daya 19

BAB 2 PERENCANAAN KERJA 22

2.1 Rencana Strategis 22

2.2 Indikator Kinerja Utama 25

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 26

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 29

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 29

3.2 Analisis Capaian Kinerja 29

3.3 Akuntabilitas Keuangan 71

BAB 4 PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	24
2.	Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	26
3.	Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	27
4.	Tabel 2.4 Program Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	28
5.	Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
	Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja	33
6.	Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	34
7.	Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	35
8.	Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tujuan Perangkat Daerah	36
9.	Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 1 Perangkat Daerah	37
10.	Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 2 Perangkat Daerah	38
11.	Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 3 Perangkat Daerah	39
12.	Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 4 Perangkat Daerah	41
13.	Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi	43
14.	Tabel 3.11 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan	45
15.	Tabel 3.12 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	46
16.	Tabel 3.13 Pelayanan Informasi Keliling dan Sound System Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025	47
17.	Tabel 3.14 Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Setelah Dilakukan Pendataan Kembali Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025	48
18.	Tabel 3.15 Laporan Hasil Diseminasi Informasi Terkait Penanganan Stunting Di Kabupaten Mamuju Tahun 2025	49
19.	Tabel 3.16 Laporan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Sosial dan Website Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	51
20.	Tabel 3.17 Jumlah Kerjasama Media Cetak dan Media Online Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025	52
21.	Tabel 3.18 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	54
22.	Tabel 3.19 Laporan Rekapitulasi Fasilitasi ZoomMeeting Tahun 2025	54

23.	Tabel 3.20 Data BlankSpot Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	55
24.	Tabel 3.21 Usulan Titik Blank Spot Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025	57
25.	Tabel 3.22 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	66
26.	Tabel 3.23 Data Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai Tahun 2025	67
27.	Tabel 3.24 Analisis Hasil Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	71
28.	Tabel 3.25 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD Triwulan I - IV (Januari - Desember) Setelah Pergeseran Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025	72

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
1.	Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025	6
2.	Gambar 1.2 Jumlah ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Berdasarkan Jabatan	20
3.	Gambar 1.3 Jumlah ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Berdasarkan Jenis Kelamin	20
4.	Gambar 1.4 Jumlah ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
5.	Gambar 3.1 Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N Tahun 2025	53
6.	Gambar 3.2 Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah	61
7.	Gambar 3.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	62
8.	Gambar 3.4 Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	63
9.	Gambar 3.5 Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Perangkat Daerah Dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025	64
10.	Gambar 3.6 Pembinaan Statistik Sektoral Oleh Pembina Data Kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	65
11.	Gambar 3.7 Laporan Kegiatan Pengelolaan Email SANAPATI Tahun 2025	68
12.	Gambar 3.8 Laporan Assessment Indeks Keamanan Informas (IKAMI) Versi 5.0 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	69
13.	Gambar 3.9 Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 360 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Mamuju	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat. Pesatnya pengembangan TIK akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk Pemerintahan daerah) secara keseluruhan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat kebijakan untuk memanfaatkan TIK untuk membangun *Electronic Goverment for Good Governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur TIK yang dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar Akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada tahun 2021 penyusunan LAKIP telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan pada peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun

sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor : 70);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamumu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor : 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor : 23).

12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah , (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor : 16).
13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor : 18).

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamumu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan komunikasi dan diseminasi informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas KOMINFOSIP mempunyai fungsi :

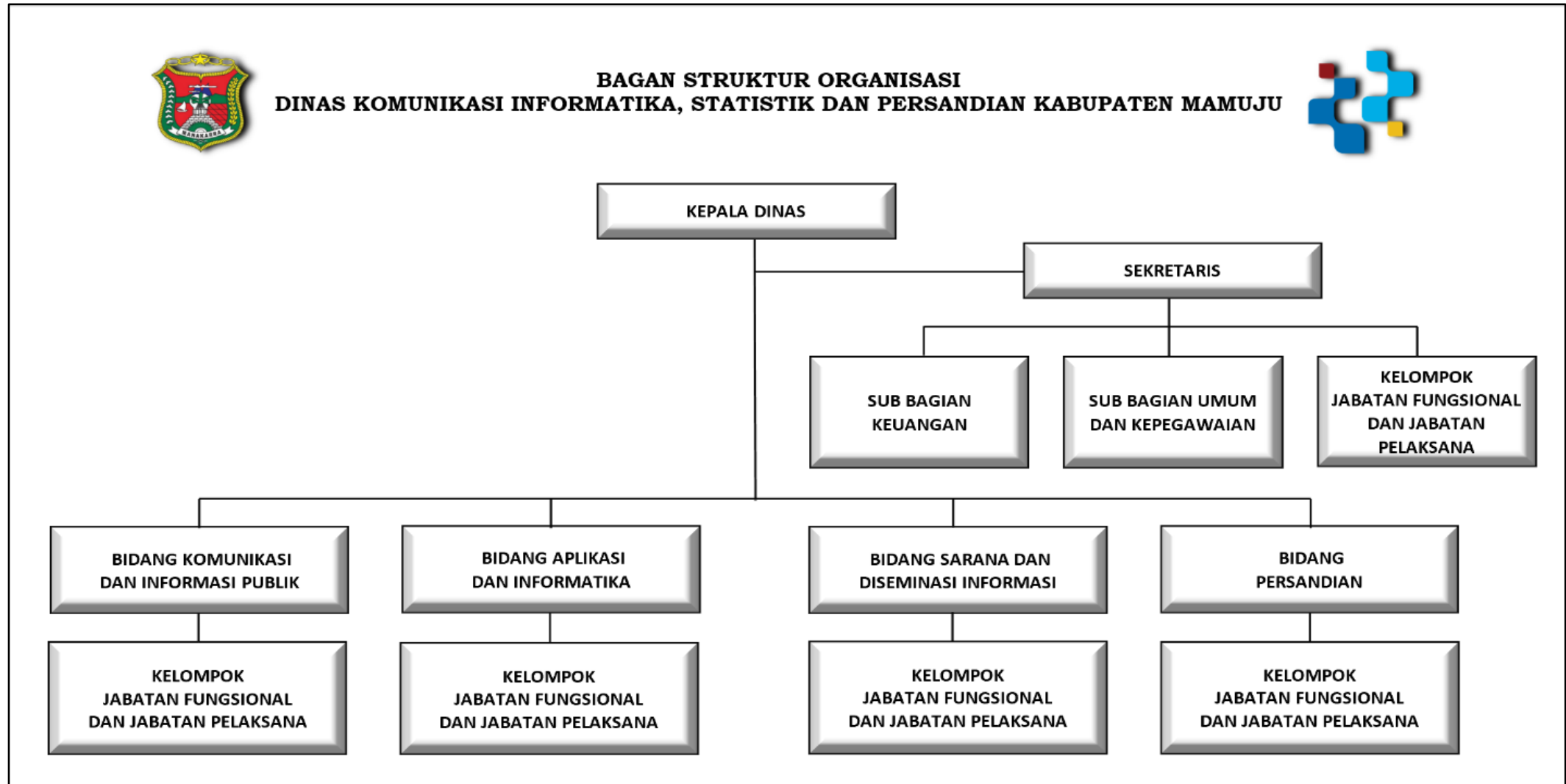
- a. Perumusan Kebijakan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan Aplikasi Informatika
- c. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas daerah kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III), 13 Orang Pejabat Fungsional Ahli Muda dan 2 Orang Kasubag (Eselon IV), 10 Orang Pelaksana, 4 Orang PPPK :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Perencana Ahli Muda
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
 - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
 - c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
4. Bidang Aplikasi dan Informatika
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda
 - b. Pranata Komputer Ahli Muda
 - c. Analis Kebijakan
5. Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi
 - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
 - b. Pranata Siaran Ahli Muda
 - c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
6. Bidang Persandian
 - a. Sandiman Ahli Muda
 - b. Sandiman Ahli Muda
 - c. Sandiman Ahli Muda

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
Tahun 2025



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

1.5 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Mamuju

Kepala Dinas Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Bidang Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informasi dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamumu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
4. Koordinasi dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Persandian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan administrasi dinas daerah kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Berikut uraian tugas, kepala, sekretaris, kepala Bidang-bidang serta kepala seksi sebagai berikut :

1. Rincian Tugas Kepala Dinas

- Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan membina penyelenggaraan pemerintahan urusan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian agar urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Mamuju dapat berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 - b) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 - c) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan di Bidang Aplikasi dan Informatika yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 - d) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan di Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 - e) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan di Bidang Persandian yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;

2. Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan membina penyelenggaraan ketatausahaan, perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran Pelaksanaan tugas.
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan rencana program dan kegiatan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;

- b) Perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 - c) Perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan keuangan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
- Sekretariat terdiri atas:
- a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian melaksanakan tugas menjalankan fungsi :
 1. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan program kerja administrasi Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap Barang-barang milik Negara (Aset) berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan secara tepat dan berjangka panjang;
 3. Pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan terhadap penyelenggaraan urusan Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Pelaksanaan dan Pemeliharaan Urusan Rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 5. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Absensi Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 - b) Sub Bagian keuangan dalam melaksanakan tugas menjalankan fungsi :
 1. Pelaksanaan, perumusan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perbendaharaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu dan akuntabel;
 2. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Rencana Program dan Kegiatan dilingkungan Sub Bagian Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;

3. Pelaksanaan, Perumusan, Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan Administrasi dilingkungan Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 4. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Mamuju.
- c) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dalam melaksanakan tugas menjalankan fungsi :
1. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan rumusan pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 2. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan rumusan pembuatan DPA dan RKA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 3. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan rumusan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
 4. Pelaksanaan, monitoring, dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang informasi dan komunikasi publik mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan dan Pelaksanaan penyelenggaraan urusan di bidang Hubungan Kelembagaan Informasi;
 - b) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan di bidang Pengawasan Data dan Informasi;
 - c) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan di bidang Monitoring dan Pengaduan Informasi.
- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari :
 1. ***Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Ahli Muda)***, mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring isu publik dan pengaduan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi Monitoring dan pengaduan Informasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan monitoring isu publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasikan kegiatan monitoring isu Publik;
- 3) Pelaporan tugas monitoring isu publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Pengaduan Masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi monitoring dan pengaduan Masyarakat.

2. ***Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Ahli Muda)***, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan tema kampanye kebijakan pemerintah dan informasi/ kebijakan nasional maupun daerah dan pengelolaan data informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud seksi pengawasan data informasi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana operasional seksi Pengawasan Data dan Informasi berdasarkan program kerja bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 2) Penyusunan konsep pengelolaan Informasi atau kebijakan Pemerintah berdasarkan prioritas seksi Pengawasan Data dan Informasi;
- 3) Penyusunan data rekaman video terkait kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang akan dituangkan kedalam videotrone;
- 4) Pelaksanaan Pemeliharaan terhadap inventaris videotrone Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- 5) Pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan dilingkungan Seksi Pengawasan Data dan Informasi;

3. ***Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Ahli Muda)***, mempunyai tugas pokok melaksanakan penguatan pelayanan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan informasi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan anggaran seksi Pelayanan Informasi;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi dilingkungan seksi Pelayanan Informasi;

- 3) Perumusan konsep dan analisis Dokumentasi kegiatan Daerah dan Komunikasi antar Media;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkup seksi Pelayanan Informasi;
- 5) Pelaksanaan Peliputan Data berupa rekaman gambar maupun video sebagai bahan perumusan Data Informasi;

4. Bidang Aplikasi Informatika

- Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengembangan *Application Program Interface* (API) dan Pengelolaan E-Gov serta pemberdayaan aplikasi informatika untuk mengintegrasikan sistem lintas Perangkat Daerah guna mengoptimalkan pelayanan publik berbasis TIK, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, penyelenggaraan SMART CITY serta pengawasan peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah berbasis elektronik, serta pelaksanaan e-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c) Pengkoordinasian integrasi sistem lintas Perangkat Daerah dan instansi melalui Aplikasi Program Interface (API) dan website, serta pengendalian rekomendasi hosting start up publik di Daerah dan rekomendasi penyediaan pengelolaan akses internet bagi seluruh Perangkat Daerah dan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :
 1. ***Pranata Komputer Ahli Muda***, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengembangan kapasitas Perangkat Daerah dan Masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dan Masyarakat di Bidang TIK, serta penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan berbasis TIK, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pemberdayaan aplikasi informatika mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan Penyusunan rencana program dan kegiatan anggaran seksi pemberdayaan Informatika;
- 2) Pelaksanaan Peningkatan dan pengembangan kapasitas Aparatur dan Masyarakat di Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan Penyiapan dan penyelenggaraan SMART CITY serta pemanfaatan ruang terbuka publik berbasis teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pengendalian menara telekomunikasi;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi dilingkungan Seksi Pemberdayaan Informatika;
- 5) Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

2. ***Pranata Komputer Ahli Muda***, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan peningkatan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang bersih, transparan, yang luas menjawab tuntutan perubahan yang efektif, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan *e-Government* yang baik, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi *e-Government* mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan, perencanaan serta penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan *e-Government*;
- 2) Pengembangan penyelenggaraan Perangkat Daerah berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan *e-Government* berdasarkan system manajemen dilingkungan Pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi dilingkungan Seksi Pelayanan *e-Government*;
- 5) Pelaksanaan kegiatan pelaporan data elektronik Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Pusat.

3. ***Analisis Kebijakan***, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas dan rencana kegiatan pengembangan aplikasi Informasi, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi pengembangan teknologi informasi mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan rencana operasional seksi pengembangan teknologi informasi berdasarkan rencana program bidang aplikasi informatika.
 - 2) Penyusunan rancangan konsep pengembangan *Application Program Interface* (API).
 - 3) Pengembangan *Application Program Interface* (API) bagi kepentingan PD dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Pengembangan bisnis proses Re-engineering lintas Perangkat Daerah dan lintas Instansi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Pengembangan analisa big data sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi

- Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Sarana dan Diseminasi Informasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika agar dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Sarana dan Diseminasi informasi mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja operasional bidang sarana dan Diseminasi informasi berdasarkan rencana program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - b) Pengevaluasian konsep pengembangan layanan portal kabupaten dengan menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Pengevaluasian nama domain bagi kepentingan seluruh PD dan menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- d) Perekonomian nama sub domain bagi kepentingan seluruh Perangkat Daerah pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e) Perekomendasi hosting bagi start up publik di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f) Perekomendasi penyediaan dan pengelolaan data center, *disaster recovery center* sesuai ketentuan yang berlaku dan TIK pemerintahan kabupaten.
 - g) Perekomendasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi seluruh PD sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h) Perekomendasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i) Pemvalidasian hasil pengelolaan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan instansi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - j) Pengkoordinasian penguatan hubungan dengan media (Media Relations).
 - k) Pengkoordinasian pelaksanaan konversi pers dan kunjungan jurnalistik.
 - l) Pengkoordinasian pembentukan lembaga mitra komunikasi di Kabupaten.
 - m) Pengkoordinasian penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategis lainnya.
 - n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
- Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi terdiri dari :
1. ***Pranata Humas Ahli Muda***, mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pengelolaan sarana informasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi sarana informasi mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana operasional seksi sarana informasi dan penyediaan berdasarkan rencana program bidang sarana dan Diseminasi informasi.
 - 2) Penganalisisan dan pengevaluasian berdasarkan nama domain bagi kepentingan seluruh Perangkat Daerah dengan menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3) Perencanaan pelaksanaan Diseminasi informasi kebijakan melalui media berdasarkan strategi komunikasi.
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi sarana informasi.
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
2. ***Pranata Siaran Ahli Muda***, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyediaan dan pengelolaan data center, akses internet dan pengelolaan informasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pengelolaan dan penyediaan informasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana operasional seksi pengolahan dan penyediaan informasi berdasarkan rencana program bidang sarana dan Diseminasi informasi.
 - 2) Pengevaluasian penyediaan dan pengelolaan data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Kabupaten Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Pengevaluasian penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Pengevaluasian penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik.
 - 5) Pemverifikasian hasil pengolahan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi pengelolaan dan penyediaan informasi.
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
3. ***Pranata Humas Ahli Muda***, mempunyai tugas pokok melaksanakan penguatan lembaga mitra komunikasi di Kabupaten/Kota.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi hubungan kelembagaan informasi mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan rencana operasional seksi hubungan kelembagaan dan informasi berdasarkan program kerja bidang Sarana dan prasarana Diseminasi informasi.

- 2) Penyusunan konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi / media internal.
- 3) Penganalisaan dan pengklasifikasian dan pembuatan konsep pelayanan informasi publik.
- 4) Pengembangan penguatan hubungan dengan media (Media Relations).
- 5) Pembuatan konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik.
- 6) Pembuatan rencana pembentukan lembaga mitra komunikasi di Kabupaten/Kota.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada seksi hubungan kelembagaan informasi.
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Persandian

- Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi ditingkat Kabupaten/Kota.
- Untuk melaksanakan Tugas pokok tersebut Bidang Persandian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Persandian berdasarkan rencana program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Perencanaan anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi ditingkat Kabupaten/Kota dengan mengutamakan keamanan Kepala Daerah, Pimpinan Dewan dan Pimpinan perangkat daerah;
 - c. Perumusan kebijakan teknis persandian untuk keamanan Informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Lembaga sandi negara;
 - d. Pelaksanaan Penyiapan, Pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi, materil sandi dan Jaringan Komunikasi sandi (JKS);
 - e. Peningkatan Kompetensi SDM sandi melalui partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian;
 - f. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya;

➤ Bidang Persandian terdiri dari :

1. ***Sandiman Ahli Muda***, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pemenuhan Kompetensi SDM Sandi dan Sosialisasi kesadaran keamanan Informasi;

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) seksi Pembinaan Persandian mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan Seksi Pembinaan Persandian berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan pemenuhan kompetensi SDM sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat diklat sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara;
- 3) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keasadaran keamanan Informasi (*security awareness*) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya keasadaran keamanan Informasi ditingkat Pimpinan Daerah meliputi Kepala Daerah, pimpinan Dewan dan Pimpinan perangkat Daerah;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan pusat data persandian;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. ***Sandiman Ahli Muda***, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi di lingkungan Kabupaten/Kota;

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) seksi pengamanan persandian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana operasional diseksi pengamanan persandian berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian;
- 2) Pengawasan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi internal;
- 3) Pengumpulan data dan bahan kelengkapan penyusunan perencanaan anggaran target capaian penyelenggaraan persandian.
- 4) Penyiapan kebijakan-kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Lembaga Sandi Negara;
- 5) Pelaksanaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemrosesan informasi terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan Daerah;

- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan data dari gangguan jaringan sistem Informasi dengan tetap menjaga Integritas dan ketersediaan data;
 - 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkungan seksi pengamanan sandi;
 - 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. ***Sandiman Ahli Muda***, mempunyai tugas pokok melaksanakan Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi dan evaluasi Hubungan Komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1) seksi Dukungan dan Kerjasama Informasi mempunyai fungsi :

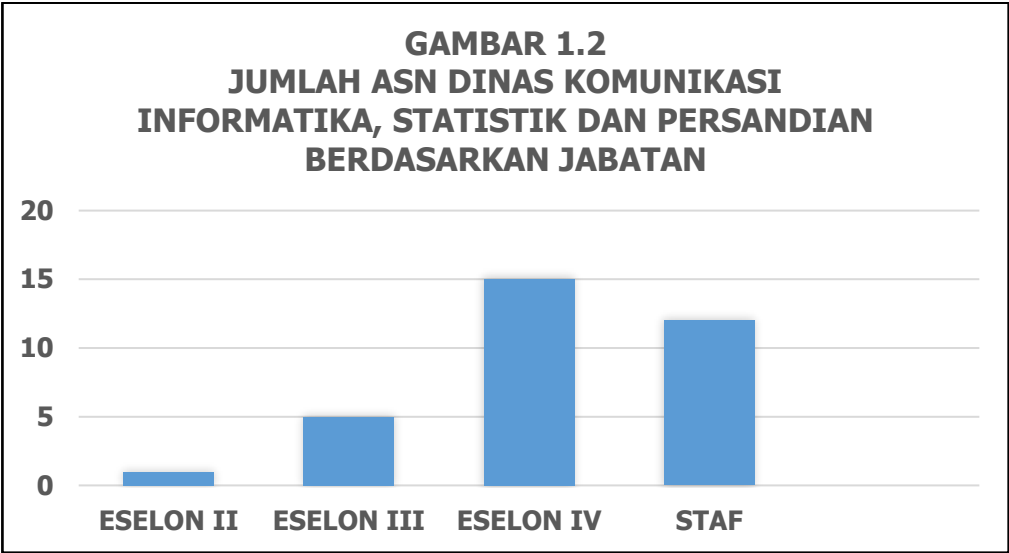
- 1) Penyusunan perencanaan informasi operasional Seksi Dukungan dan Kerjasama berdasarkan rencana operasional Bidang persandian;
- 2) Pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kesadaran keamanan Informasi dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau seminar pentingnya keamanan Informasi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah;
- 4) Pelaksanaan Kebijakan Manajemen resiko aset organisasi;
- 5) Penyiapan konsep pola hubungan komunikasi sandi;
- 6) Pelaksanaan tugas ketidasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

1.6 Sumber Daya

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju memiliki pegawai sebanyak 42 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, terdiri dari ASN 29 orang (69%), PPPK 4 orang (9%) dan Non ASN 10 orang (24%).

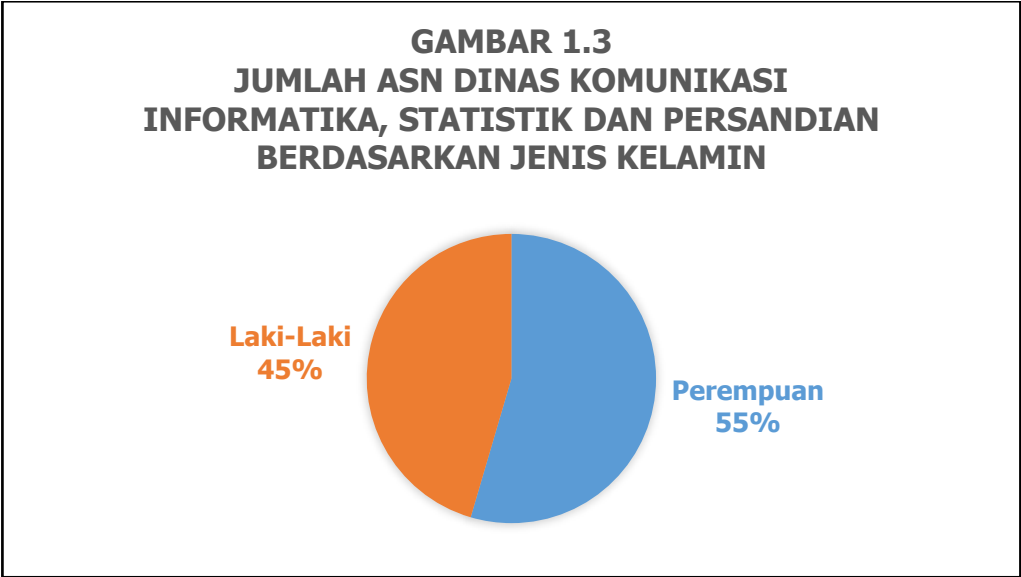
Jumlah pegawai eselon II masih kosong dari jumlah pegawai ASN yang terdiri dari Kepala Dinas. Eselon III sebanyak 4 orang yang merupakan sekretaris 1 Orang dan Kepala Bidang sebanyak 3 orang, sementara Eselon IV sebanyak 11 orang yang terdiri dari para Jabatan Fungsional dan Kepala Seksi di sekretariat yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 2 orang, Staf Pelaksana ASN sebanyak 10 orang dan 4 orang merupakan PPPK.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagaimana tabel di bawah ini :



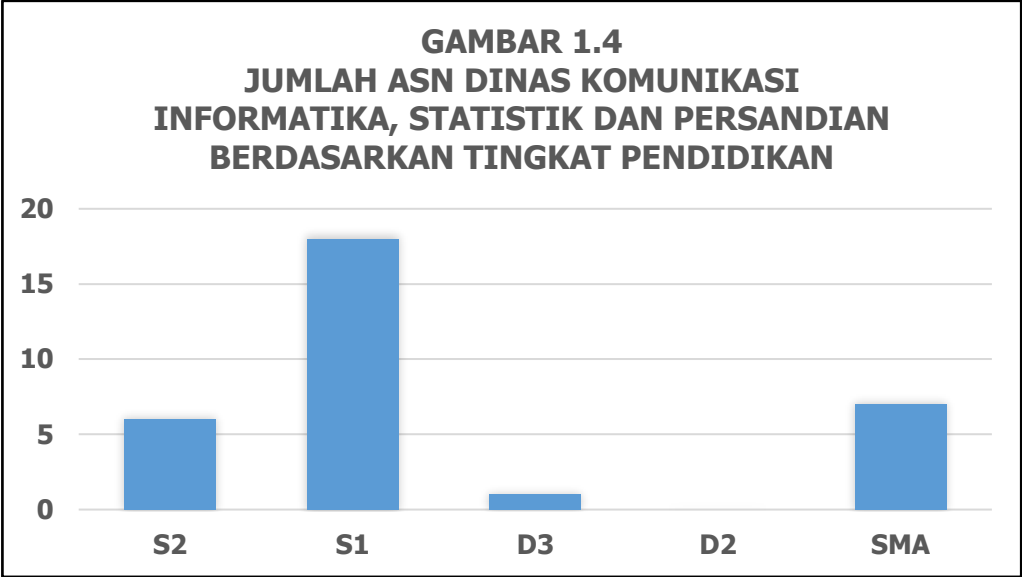
Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Rincian pegawai berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan Dinas Komonikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, sebagaimana gambar dibawah ini :



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Sementara distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurang waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rancangan Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya membuat Visi Misi Tujuan Sasaran Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana Strategis jangka awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis dan sinergi, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.1 Visi dan Misi

Perumusan Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tidak terlepas dari upaya untuk menyukseskan Visi Kabupaten Mamuju yaitu **"MAMUJU KEREN"** (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, dan Nyaman). Pada Visi tersebut terdapat makna KEREN yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas lima frase, yaitu kata Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman. Visi tersebut mengandung Filosofi dasar yaitu :

- Kreatif : Kondisi pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovasi baik dalam Tata kelolah pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan.
- Edukatif : Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani.
- Ramah : Kondisi pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-

penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nyaman : Kondisi Mamuju yang tentram dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap sumber kehidupan dan penghidupan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, dirumuskan dalam 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Fisik yang berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
- 4) Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
- 5) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju ada pada misi 1 (satu) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", dimana urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik yang berkualitas bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran,

yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju mendukung dalam pencapaian misi ke satu, yaitu : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun kedepan sesuai RPJMD Kabupaten Mamuju dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dinas yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman)			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan pelayanan komunikasi, informatika dan Persandian	Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik
			Peningkatan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
			Peningkatan Produksi Konten informasi Publik
			Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat
			Peningkatan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan	Peningkatan infrastruktur jaringan internet berbasis FO
		Meningkatnya layanan	Perumusan kebijakan dan regulasi sistem

		Pemerintahan yang Berbasis TIK	pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
			Peningkatan Layanan Website, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda
			Peningkatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda
			Peningkatan kualitas SDM Bidang TIK
	Meningkatnya keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pengembangan kualitas Layanan Keamanan Informasi
	Terselenggaranya birokrasi PD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	Menyusun perencanaan dan pengendalian pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang berkualitas	Perencanaan urusan Komuniaksi, Informatika dan Persandian berbasis kinerja
			Pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Evaluasi kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut diatas, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran, tujuan dan misi dari instansi.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	84%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Nilai	2,50
		Indeks IPS	Nilai	1,9
3	Meningkatnya keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	67%
4	Terselenggaranya birokrasi PD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	Nilai AKIP	Predikat	A

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2025 di dasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Bupati Mamuju) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	84%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,50
	Indeks IPS	1,9
Menngkatnya keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	67%
Terselenggaranya birokrasi PD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	Nilai AKIP	A

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Total Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 3.667.347.397** (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Kerja Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Mamuju

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.373.342.887	
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	174.307.740	
3.	Program Aplikasi Informatika	87.920.970	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik	14.222.350	
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	17.553.450	
	JUMLAH	3.667.347.397	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju selaku pengemban amanah Kepala Daerah Kabupaten Mamuju melaksanakan kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari kelompok indikator masing-masing urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, dan urusan Persandian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025, terdapat 4 (empat) sasaran dan juga 4 (empat) indikator yang dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerjanya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2021- 2026.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2025.

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi, informatika dan persandian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika dan Persandian	90	73,10
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	84 %	100 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,5	2,63
	Indeks IPS	1,9	Tidak Terlaksana
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	67 %	92,99 %
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	A	Masih Berproses di Inspektorat

Sumber Data : IKU DISKOMINFOSIP, 2025

Secara keseluruhan, pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang variatif dengan beberapa capaian strategis yang melampaui target, namun tetap menyisakan ruang evaluasi dan perbaikan pada masa yang akan datang.

1. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan (SPBE)

Salah satu keberhasilan utama tahun ini adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari target indeks **2,5 (Cukup)**, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Kabupaten Mamuju berhasil melampaui ekspektasi dengan meraih angka **2,63 (Baik)**. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam digitalisasi birokrasi, meskipun untuk Indeks IPS (Indeks Pembangunan Statistik) tercatat "**Tidak Terlaksana**", yang akan menjadi prioritas perbaikan pada periode mendatang.

2. Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian

Kinerja luar biasa juga ditunjukkan pada sektor keamanan informasi. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi melampaui target **67%** dengan realisasi mencapai **92,99%**. Capaian ini menandakan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan instansi pemerintah terhadap perlindungan data dan keamanan siber, dimana target aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk pejabat Eselon III sudah terealisasi 146 ASN dari target 157 ASN.

Selanjutnya Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) Pemerintah Kabupaten Mamuju yang di laporkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Tahun 2025, juga mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang dihasilkan berdasarkan kelengkapan penerapan standar SNI/ISO 27001 sesuai kategori pada **skor 326**, walau pada hasil evaluasi akhir masih berada pada level **Tidak Layak**.

Hal lain yang juga telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pad Pemerintah Daerah.

3. Diseminasi Informasi dan Kepuasan Masyarakat

Pada sektor pelayanan publik dan komunikasi, terdapat tantangan yang cukup signifikan:

- **Indeks Kepuasan Masyarakat:** Mencapai angka **73,10%**. Walaupun angka ini menunjukkan kategori baik, namun belum memenuhi target ambisius sebesar **90%**.
- **Diseminasi Informasi:** Cakupan penyebaran informasi dan komunikasi publik tercatat sebesar **100%** dari target **84%**.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

Mengenai tata kelola birokrasi internal, Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan target **A** saat ini masih dalam status "**Proses**". Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi mandiri dan pengumpulan bukti dukung kinerja sedang dilakukan untuk memastikan standar pelayanan prima tetap terjaga.

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2023 dan Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi, informatika dan persandian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika dan Persandian	90	74,08	82 %	79	76,74	97 %	84	73,10	87%
1.	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	69%	69%	100 %	79%	79%	100 %	84%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3	2,15	71,67%	2,35	2,42	103%	2,50	2.63	105%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)							1,9	Tidak Terlaksana	0
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	44%	44%	100%	56%	46%	82%	67%	92,99%	138%
4.	Terselenggaranya Birokrasi PD yang Efektif, Efisien, dan Berionterasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	BB	B	Cukup	BB	B	Cukup	A	Masih Berproses di Inspektorat	0

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =4/5*100
Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi, informatika dan persandian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika dan Persandian	73,10	90	81 %
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100 %	94 %	106 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,63	4	65,7 %
	Indeks IPS	Tidak Terlaksana	0	0 %
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	92,99 %	100 %	92,9 %
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	Masih Berproses di Inspektorat	AA	0 %

Sumber Data : RPJMD dan RKPD DISKOMINFOSIP Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :
Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2025 tercatat masih di bawah sebesar 100%, ketika dibandingkan dengan target jangka menengah

yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 86%. Data ini menunjukkan "progres yang signifikan".

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- 1. Kegiatan yang dilakukan berpedoman pada indikator kinerja
- 2. Pencapaian kinerja disesuaikan dengan indikator kinerja
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi Sulbar	Realisasi Kab/Kota Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,63 Dengan Predikat Baik	-	Tidak Ada Penilaian	-

Sumber Data : KemenPAN RB, LHE SPBE Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja Tahun 2025 adalah sebesar **2,63** dengan kategori **Baik**.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024 yaitu sebesar **2,42** dengan kategori **Cukup**, maka Indeks SPBE Tahun 2025 mengalami peningkatan indeks sebesar **0,21**.

Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, diperlukan strategi yang terencana dan terfokus. Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi :

- 1. Memaksimalkan capaian melalui pelaksanaan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah yang telah di sahkan
- 2. Meningkatkan nilai pada area penilaian SPBE
- 3. Koordinasi dan kerjasama yang lebih intens dengan Perangkat Daerah
- 4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian Indeks SPBE

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi, informatika dan persandian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika dan Persandian	90	73,10	Berhasil	Meningkatkan menjadi 100

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025

- **Analisis Keberhasilan Tujuan :**
 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju **73,10** dengan mutu pelayanan **B** atau mutu kinerja **Baik**.
 2. Unsur-unsur pelayanan yang bemutu **Baik** adalah semua dari ketujuh unsur pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, yaitu Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Informasi Media Sosial, Layanan Informasi Keliling, Melakukan Kerja Sama Media, Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Layanan SP4N-LAPOR dan Layanan Pembuatan Sub Domain.
- **Analisis Penyebab Kegagalan :**
 1. Beragamnya karakteristik dari responden dalam menyikapi berbagai unsur pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

• **Alternatif Solusi :**

1. Optimalisasi Infrastruktur : Pemasangan bantuan internet dari Program BAKTI KOMDIGI sebanyak 39 Titik yang merupakan usulan Tahun 2024 dan mengajukan usulan tambahan sebanyak 104 titik bantuan internet sebagai langkah nyata mengurangi keluhan masyarakat di area *blankspot*.

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 1
Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	84 %	100 %	Berhasil	Meningkatkan Menjadi Lebih Informatif

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025

• **Analisis Keberhasilan Sasaran :**

1. Pelayanan Informasi Keliling melalui kendaraan keliling mampu menjangkau area "blank spot" atau pelosok yang mungkin tidak terjangkau sinyal internet atau media sosial
2. Dengan memiliki layanan internal untuk pelayanan sound system, Pemerintah Daerah menghemat biaya sewa vendor pihak ketiga
3. Peningkatan Literasi Digital : Berhasil meningkatkan kemampuan anggota KIM dalam menyaring berita bohong (*hoax*) dan menyebarkan informasi pembangunan daerah
4. Dominasi Media Online: Melalui kerjasama dengan 11 media online yang menghasilkan 165 rilis membuktikan efektivitas penyebaran berita secara cepat dan luas (*SEO friendly*)

• **Analisis Penyebab Kegagalan :**

1. Informasi keliling dapat terhambat oleh cuaca (hujan) atau kondisi yang membuat pesan suara tidak terdengar jelas
2. Resiko Kerusakan : Peralatan elektronik yang jarang digunakan justru lebih rentan rusak karena kelembapan atau penurunan fungsi komponen

3. Infrastruktur Jaringan : Beberapa KIM di wilayah pelosok Mamuju mungkin terkendala sinyal internet untuk mempraktikkan diseminasi informasi digital.
4. Kualitas vs Kuantitas : Dengan volume publikasi yang besar, tantangannya adalah memastikan interaksi (*engagement*) seperti komentar dan *likes* dari masyarakat juga tinggi, bukan sekadar jumlah postingan.

• **Alternatif Solusi :**

1. Diversifikasi Media : Melengkapi kendaraan keliling dengan selebaran/pamflet fisik agar masyarakat memiliki catatan tertulis setelah kendaraan lewat.
2. Maintenance Rutin : Melakukan pengecekan berkala (pemanasan alat) setiap minggu meskipun tidak ada jadwal kegiatan untuk menjaga kualitas audio.
3. Reward & Recognition : Memberikan penghargaan bagi KIM paling aktif untuk memacu semangat kompetisi positif antar komunitas
4. Optimalisasi Konten Video : Mengubah format rilis berita menjadi video pendek (Reels/TikTok) untuk menyesuaikan tren konsumsi informasi masyarakat saat ini

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 2
Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Analisis Keberhasla /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,5	2,63	Berhasil	Peningkatan Aspek Penilaian Indokator SPBE
	Indeks IPS	1,9	Tidak Terlaksan a		

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025

• **Analisis Keberhasilan Sasaran :**

1. Kepastian Hukum : Adanya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang SPBE ini adalah "Kemenangan Strategis" karena memberikan dasar hukum kuat untuk mewajibkan seluruh perangkat daerah mengimplementasikan SPBE

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola : Meraih nilai 2,63 (Baik) menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju telah memenuhi standar minimum maturitas digital sesuai PermenPAN RB No. 59 Tahun 2020
 3. Sentralisasi Data : Berhasil mengintegrasikan berbagai aplikasi perangkat daerah di bawah kendali teknis DISKOMINFOSIP untuk memudahkan pengawasan
- **Analisis Penyebab Kegagalan :**
 1. Kesenjangan Digital : Angka 21,21% *blankspot* merupakan tantangan besar bagi pemerataan informasi di Mamuju, terutama di wilayah topografi sulit.
 2. Urgensi Layanan Dasar : Fokus pada 89 titik pendidikan dan 6 titik kesehatan menunjukkan bahwa akses internet belum merata pada sektor pelayanan publik paling krusial
 - **Alternatif Solusi :**
 1. Pemetaan Presisi : Melakukan pendataan *by name by address* untuk fasilitas publik agar usulan bantuan ke pemerintah pusat (Bakti KOMDIGI) atau Provinsi lebih akurat.
 2. Self-Assessment Rutin : Melakukan pra-evaluasi internal sebelum penilaian pusat untuk mengidentifikasi indikator yang masih lemah (seperti aspek Audit TIK atau Keamanan Informasi)
 3. Migrasi ke Cloud/PDN : Mulai memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) untuk menjamin keamanan data dan mengurangi beban biaya pemeliharaan server fisik lokal

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 3
Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggara an Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	67 %	92,99 %	Berhasil	Meningkat kan Keamanan Informasi

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025

- **Analisis Keberhasilan Sasaran :**

1. Adopsi Digital Masif : Angka 337 ASN menunjukkan bahwa TTE tidak lagi hanya digunakan oleh pimpinan puncak (KDH/Eselon II), tetapi sudah merambah ke pejabat administrator dan fungsional
2. Efisiensi Administrasi : Penggunaan TTE secara langsung memangkas waktu tunggu tanda tangan basah, memungkinkan proses surat-menysurat tetap berjalan meskipun pejabat sedang dinas luar
3. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) - SK Bupati Nomor 360 tahun 2025, Kesiapan Respon : Pembentukan TTIS (Kab-Mamuju CSIRT) merupakan syarat wajib dari BSSN dalam membangun ketahanan siber daerah yang terorganisir

- **Analisis Penyebab Kegagalan :**

1. Kesenjangan Digital : Angka 21,21% *blankspot* merupakan tantangan besar bagi pemerataan informasi di Mamuju, terutama di wilayah topografi sulit.
2. Laporan Assessment IKAMI Versi 5.0 (Skor 326 - Level Tidak Layak) atau Gap Standar Nasional : menunjukkan bahwa meskipun secara teknis sistem berjalan, secara dokumentasi dan tata kelola belum memenuhi standar ISO/IEC 27001.

- **Alternatif Solusi :**

1. Jemput Bola : Melakukan asistensi langsung (pendaftaran dan verifikasi wajah) ke setiap Perangkat Daerah untuk mempercepat penerbitan sertifikat elektronik dari BSR
2. Penyaringan User : Membatasi akses hanya pada personil tertentu yang memiliki integritas dan kompetensi sandi (Sandiman)
3. Peningkatan Kompetensi SDM : Mengikutsertakan staf teknis dalam pelatihan sertifikasi keamanan informasi agar mampu mengimplementasikan kontrol keamanan sesuai parameter IKAMI

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 4
Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	A	Masih Berproses di Inspektorat	Proses	Meningkatkan Untuk Mencapai Target Tertinggi

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025

- Analisis Keberhasilan Sasaran :**
 - Kedisiplinan Manajerial : Ketepatan waktu menunjukkan adanya koordinasi yang solid antara sub-bagian penyusunan program dengan bidang-bidang teknis dalam mengumpulkan data capaian.
 - Pemahaman Indikator Kinerja : Tim penyusun memiliki pemahaman yang baik terhadap IKU (Indikator Kinerja Utama), sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya tepat waktu tetapi juga berkualitas dan terukur.
 - Kenyamanan Lingkungan Kerja : Sarana kantor yang representatif meningkatkan produktivitas dan loyalitas ASN dalam memberikan layanan publik
- Analisis Penyebab Kegagalan :**
 - Sinkronisasi Data Lintas Bidang : Terkadang terjadi keterlambatan dari unit kerja teknis dalam menyerahkan laporan fisik/bukti dukung (*evidence*) yang mengakibatkan tim penyusun harus bekerja ekstra di akhir tenggat waktu.
- Alternatif Solusi :**
 - Rapat Evaluasi Bulanan : Melaksanakan rapat internal rutin untuk memantau capaian target fisik dan keuangan sebelum memasuki masa pelaporan.
 - Digitalisasi Arsip Bukti Dukung : Mewajibkan setiap bidang mengunggah bukti kegiatan (foto, daftar hadir, notulensi) ke penyimpanan awan (*cloud*) segera setelah kegiatan selesai.

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi

Tujuan/Sasaran	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
				Rp.	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	84%	100%	100%	174.307.740	164.768.282	76,66	23,34 % Sangat Efisien (Hemat anggaran namun target tercapai 100%)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50	2.63	105%	87.920.970	87.521.169	99,26	5,47 % Efisien (Output melampaui target dengan anggaran hampir penuh)
	1,9	Tidak Terlaksana	0	14.222.350	3.499.828	34,76	-34,76% Tidak Efisien (Anggaran terserap sebagian tapi kinerja nol)
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	67%	92,99%	138%	17.553.450	17.358.672	98,86	28,36% Sangat Efisien (Output melampaui target 138% dengan biaya 98%)
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	A	Masih Berproses di Inspektorat	0	3.373.342.887	3.086.467.160	89,69	-89,69% Tidak Efisien (Realisasi kinerja belum terukur/0% sementara anggaran terserap besar)

Sumber Data : Evaluasi RENJA DISKOMINFOSIP, Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis Hasil

1. Efisiensi Positif (Keberhasilan) :

- Diseminasi Informasi : berhasil menghemat anggaran sebesar 23,34% dari total pagu namun tetap mencapai target kinerja 100%. Ini adalah bentuk efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik.
- Keamanan Informasi : Memiliki tingkat efisiensi tertinggi karena realisasi kinerja jauh melampaui target (138%) sementara anggaran yang digunakan tidak sampai 100%.

2. Efisiensi Negatif (Kendala) :

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah : Karena capaian kinerjanya tertulis 0% (Satu tidak terlaksana dan satu lagi masih berproses di Inspektorat), maka secara matematis nilainya negatif. Artinya, ada sumber daya (anggaran) yang sudah keluar/terpakai namun manfaat atau outputnya belum bisa dirasakan atau diukur.

Catatan untuk Laporan ini

Untuk poin nomor 5 (terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah), jika nanti hasil dari Inspektorat sudah keluar dan kinerjanya mencapai (misalnya) 90%, maka tingkat efisiensinya akan berubah menjadi positif. Selama nilainya masih "0", maka dalam laporan audit hal ini dikategorikan sebagai **pemborosan/ketidakefisienan**.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang mmenjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan penerintah yang dipublikasi	73,86%	Menunjang	Sesuai dengan program/ kegiatan yang telah ditentukan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,63	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pesentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	100%	Menunjang	Sesuai dengan program/ kegiatan yang telah ditentukan
	Indeks IPS	Tidak Terlaksana	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan,Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	33,67%	Menunjang	Sesuai dengan program/ kegiatan yang telah ditentukan
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	92,99%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data Statistik Sektoral	100%	Menunjang	Sesuai dengan program/ kegiatan yang telah ditentukan
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	Masih Berproses di Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,29 %	Menunjang	Sesuai dengan program/ kegiatan yang telah ditentukan

Sumber Data : Evaluasi RENJA DISKOMINFOSIP, Tahun 2025

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja yang mendukung. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan, berupa dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diperjanjikan melalui Perjanjian kinerja 2025 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Hasil analisis tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan komunikasi dan informatika secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 3.11
Analisis Hasil Capaian
Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	84 %	100 %

Sumber Data : DISKOMINFOSIPSIP, 2025

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya Penyebaran Informasi terkait dengan Pencegahan Stunting, Sosialisasi Sampah dan Diseminasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tepat Waktu melalui penyebaran informasi pengumuman kendaraan keliling sebanyak 13 kali selama setahun;
2. Terlaksananya pelayanan Sound System sebanyak 8 kali untuk kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;

Tabel 3.12
Pelayanan Informasi Keliling dan Sound System
Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju Tahun 2025

NO.	DASAR KEGIATAN	TANGGAL	KECAMATAN	KEGIATAN
1	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	17 Februari 2025	Tapalang	Pelayanan sound system pada acara Karnaval Mobil Hias Tingkat Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh IGTKI
2	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	18 Februari 2025	Tapalang Barat	Pelayanan sound system dalam rangka Launching 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SD Negeri 1 Mamuju
3	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	19 Februari 2025	Mamuju	Pelayanan sound system di Stadion Manakarra dalam rangka penutupan Open Turnamen Sepak Bola Manakarra Cup 2 Tahun 2025
4	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	19 Februari 2025	Simboro	Diseminasi Informasi dengan tema Pencegahan Stunting, Makanan Sehat untuk Ibu Hamil, Anak Sehat dan Cerdas
5	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	21 Februari 2025	Kelukku	Diseminasi Informasi dengan tema Ayo bayar PBB, Pencegahan Stunting, Makanan Sehat untuk Ibu Hamil, Anak Sehat dan Cerdas
6	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	22 Februari 2025	Mamuju	Diseminasi Informasi dengan tema Jaga Kebersihan Pantai arteri dan Anjungan Manakarra
7	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/000.1.2.3/57/II/2025 tanggal 26 Februari 2025	26 Februari 2025	Papalang	Diseminasi Informasi dengan tema Ayo bayar PBB, Pencegahan Stunting, Makanan Sehat untuk Ibu Hamil, Anak Sehat dan Cerdas
8	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/000.1.2.3/57/II/2025 tanggal 26 Februari 2025	27 Februari 2025	Mamuju	Diseminasi Informasi dengan tema Ayo bayar PBB, Pencegahan Stunting, Makanan Sehat untuk Ibu Hamil, Anak Sehat dan Cerdas
9	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/000.1.2.3/57/II/2025 tanggal 26 Februari 2025	12 Maret 2025	Mamuju	Pelayanan sound system dalam rangka buka puasa bersama di SAPOTA
10	Surat Ketua Pengurus Kabupaten IGTKI PGRI Nomor 014/B.Org/P.Kab-IGTKI-PGRI/IV/2025 tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Mobil Soundsystem	3 Mei 2025	Mamuju	Pelayanan sound system pada acara Karnaval Mobil Hias Tingkat Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh IGTKI
11	Surat Sekretaris Dinas Dikpora Nomor 890/721/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Sound system	24 Mei 2025	Mamuju	Pelayanan sound system dalam rangka Launching 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SD Negeri 1 Mamuju
12	Surat Ketua Panitia Nomor 026/PM/PSSI/V/2025 Tanggal 15 Juni 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Soundsystem	18 Juni 2025	Mamuju	Pelayanan sound system di Stadion Manakarra dalam rangka penutupan Open Turnamen Sepak Bola Manakarra Cup 2 Tahun 2025
13	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/800.1.11.1/93/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025	14 Agustus 2025	Mamuju	Latihan dan gladi pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-80 di Kantor Bupati Mamuju
14	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/800.1.11.1/93/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025	15 Agustus 2025	Mamuju	Latihan dan gladi pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-80 di Kantor Bupati Mamuju
15	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/800.1.11.1/93/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025	16 Agustus 2025	Mamuju	Latihan dan gladi pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-80 di Kantor Bupati Mamuju
16	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/800.1.11.1/93/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025	17 Agustus 2025	Mamuju	Upacara pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-80
17	Surat Perintah Tugas Plt Kadis Kominfo Nomor B/000.1.2.3/148/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025	15 sd 16 Oktober 2025	Sampaga	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam acara Lomba Desa Anti Korupsi di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga
18	Surat Bupati Mamuju Nomor 400.14.1.1/45/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Undangan Upacara Hari Sumpah Pemuda	27 Oktober 2025	Mamuju	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam rangka gladi dan upacara Sumpah Pemuda di Kantor Bupati Mamuju.
19	Surat Bupati Mamuju Nomor 400.14.1.1/45/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Undangan Upacara Hari Sumpah Pemuda	28 Oktober 2025	Mamuju	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam rangka gladi dan upacara Sumpah Pemuda di Kantor Bupati Mamuju.
20	Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Nomor 460/263/XI/2025/DINSOS tanggal 7 November 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Soundsystem	9 November 2025	Mamuju	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam rangka gladi upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan di TMP Pattidi Kecamatan Simboro
21	Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Nomor 460/263/XI/2025/DINSOS tanggal 7 November 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Soundsystem	10 November 2025	Mamuju	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam rangka gladi dan upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan di TMP Pattidi Kecamatan Simboro

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3. Terlaksananya kegiatan pembinaan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk 20 KIM di Kabupaten Mamuju;
4. Terlaksananya pendataan kembali Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Mamuju sejumlah 38 KIM.

Tabel 3.13
Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
Setelah Dilakukan Pendataan Kembali
Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Bala Balakang	Desa Bala Balakang	Juma Ali	Ketua KIM Bina Balbar
2	Kalukku	Kelurahan Bebanga	Kamaluddin	Ketua KIM Pemersatu
3	Kalukku	Desa Keang	Nehemia	Ketua KIM Keang
4	Kalukku	Desa Kabuloang	Dina Evayanti	Ketua KIM Desa Kabuloang
5	Mamuju	Desa Tadui	Musliadi	Ketua KIM Tikar
6	Mamuju	Desa Bambu	Rukman Rasyid	Ketua KIM Ds Bambu
7	Mamuju	Desa Karampuang	Sadri	Ketua KIM Desa Karampuang
8	Mamuju	Desa Karampuang	Fahri	Ketua Kim Liutang
9	Mamuju	Desa Karampuang	Fajri	Ketua Kim Gemapul
10	Mamuju	Desa Karampuang	Aan Riswanda	Ketua Kim Tanete
11	Mamuju	Kelurahan Binanga	Sukmawati, M	Ketua KIM Hikma Binanga
12	Mamuju	Kelurahan Binanga	Bau Te'ne	Ketua KIM Anggrek
13	Mamuju	Kelurahan Rimuku	Abd. Hafid	Kim Nurul Bakeri
14	Mamuju	Desa Batu Pannu	Sardi	Ketua KIM Batu Pannu
15	Mamuju	Desa Tadui	Amran	Ketua KIM Desa Tadui
16	Papalang	Desa Topore	Abd Rahman, SP	Ketua KIM Mandar Pitu
17	Papalang	Desa Bonda	Sulaeha, SP	Ketua KIM Sikasayangang
18	Papalang	Desa Papalang	Paharuddin	Ketua KIM Papalang
19	Sampaga	Desa Kalonding	Samsul Maarif	Ketua KIM Mamuju Mapaccing
20	Simboro	Desa Botteng	Zainal	Ketua KIM Desa Botteng
21	Simboro	Desa Botteng Utara	Amir	Ketua KIM Botteng Utara
22	Simboro	Saletto	Mujahiddin/ Warlia	Ketua KIM Mesakada Saletto
23	Simboro	Kelurahan Rangas	Udin Saqila	Ketua KIM Karebata

24	Simboro	Desa Sumare	Ramli	Ketua KIM Parundang
25	Tapalang	Desa Tampalang	Muh Alil K	Ketua KIM Desa Tampalang
26	Tapalang	Kelurahan Galung	Mauludin	Ketua KIM Pemuda Kreatif Tapalang
27	Tapalang	Kelurahan Kasambang	Hendri Dede Wahyudi	Ketua KIM Tonimana
28	Tapalang	Desa Taan	Muh Asran/Accank	Ketua KIM Balangan Latte
29	Tapalang	Desa Orobatu	Koesmayadi, SE	Ketua KIM Orobatu
30	Tapalang	Desa Kopeang	Karmin	Ketua KIM Maju Bersama
31	Tapalang	Desa takandeang	Mahyuddin	Ketua KIM Gerbang Desata
32	Tapalang	Kelurahan Dayanginna	Muh. Yamin Muin	Ketua KIM Harapan Baru
33	Tapalang Barat	Desa Pasa'bu	Muh Fahrunnisa	Ketua KIM Pammase Puang
34	Tapalang Barat	Desa Ahu	Udin, SPd	Ketua KIM Tabalida
35	Tapalang Barat	Desa Labuang rano	Hamsah Mansyur, Takwa	Ketua KIM Kusmenaf
36	Tapalang Barat	Desa Lebani	Muh. Imran	Ketua KIM Sipammesa
37	Tommo	Desa Rante Mario	I Wayan Sukardiana	Ketua KIM Mamuju Mapaccing Rante Mario
38	Tommo	Desa Kakulasang	Emanuel Eko Pratomo, S.Th, S.Pdk	Ketua KIM Solid

Sumber Data : *DISKOMINFOSIP, 2025*

5. Tersedianya data hasil diseminasi informasi kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk publikasi penanganan stunting di Kabupaten Mamuju

Tabel 3.14
Laporan Hasil Diseminasi Informasi
Terkait Penanganan Stunting
Di Kabupaten Mamuju Tahun 2025

1. SULBAR EXPRESS (sulbarexpress.fajar.co.id)

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA	LINK
1	17 september 2025	Pemkab Mamuju siapkan Dokumen Kontijensi Penanguulangan Kedaruratan Kesehatan	https://sulbarexpres.fajar.co.id/2025/09/17/pemkab-mamuju-siapkan-dokumen-kontijensi-penanggulan-kedaruratan-kesehatan/
2	19 september 2025	dukungan World Cleanup day Indonesia, Pemkab Mamuju Gelar Pembersihan di Area Publik	https://sulbarexpres.fajar.co.id/2025/09/19/dukung-world-cleanup-day-indonesia-pemkab-mamuju-gelar-pembersihan-di-area-publik/
3	24 september 2025	Ibu Rumah Tangga Rasakan Taki Asuh Stunting Hadirkan Orang Tua Kedua.	https://sulbarexpres.fajar.co.id/2025/09/24/ibu-rumah-tangga-rasakan-taki-asuh-stunting-hadirkan-orang-tua-kedua/
4	29 september 2025	Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju Resmi DiBuka.	https://sulbarexpres.fajar.co.id/2025/09/29/sekolah-rakyat-terintegrasi-72-mamuju-resmi-dibuka/

2. RADAR SULBAR (radarsulbar.fajar.co.id)

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA	LINK
1	19 september 2025	Dukung World Cleanup day Indonesia, Pemkab Mamuju Kembali Gelar Pembersihan di Area Publik	https://radarsulbars.fajar.co.id/2025/09/19/dukung-world-cleanup-day-indonesia-pemkab-mamuju-kembali-gelar-pembersihan-di-area-publik/
2	24 september 2025	widyawati Rasakan Taki Asuh Stunting Hadirkan Orang Tua Kedua	https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/09/24/widyawati-rasakan-taki-asuh-stunting-hadirkan-orang-tua-kedua/
3	29 september 2025	Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju Resmi DiBuka.	https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/09/29/sekolah-rakyat-terintegrasi-72-mamuju-resmi-dibuka/

3. KATINTING (katinting.com)

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA	LINK
1	02 September 2025	Taki Asuh Stunting Diupgrade, Kini Hadir dengan Layanan Terpadu dan Pasar Murah	https://katinting.com/?s=taki+asuh+Stunting+Diupgrade+kini+hadir+dengan+layanan+terpadu+dan+pasar+murah
2	03 september 2025	Tekan Stunting, Bupati Mamuju Sutinah Gelar Gerakan Taki Asuh, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Pasar Murah di Bebanga Kalukku	https://katinting.com/?s=tekan+stunting+bupati+mamuju+sutinah+gelar+gerakan+taki+asuh+pemeriksaan+kesehatan+gratis+dan+pasar+murah+di+bebanga+kalukku
3	17 september 2025	Antisipasi Wabah, Pemkab Mamuju Susun Dokumen Kontijensi Kedaruratan Kesehatan	https://katinting.com/?s=antisipasi+wabah+pemkab+mamuju+susun+dokumen+kontijensi+kedaruratan+kesehatan
4	18 september 2025	Perkuat Ketahanan Kesehatan, Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar Rancang Pedoman Penanggulangan Wabah Terpadu	https://katinting.com/?s=perkuat+ketahanan+kesehatan+pemkab+mamuju+dan+pemprov+sulbar+rancang+pedoman+penanggulangan+wabah+terpadu
5	19 september 2025	Dukung World Cleanup Day, Pemkab Mamuju Gelar Aksi Pembersihan Dijalan Arteri	https://katinting.com/?s=dukung+world+cleanup+day+pemkab+mamuju+gelar+aksi+pembersihan+dijalan+arteri
6	24 september 2025	Taki Asuh Stunting Mamuju: Bukan Hanya Bantuan Pangan, Tapi Juga Perhatian dan Motivasi	https://katinting.com/?s=taki+asuh+stunting+mamuju+bukan+hanya+bantuan+pangan+tapi+juga+perhatian+dan+motivasi
7	30 september 2025	Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju Resmi Di Buka di Kalukku	https://katinting.com/?s=sekolah+rakyat+terintegrasi+72+mamuju+resmi+dibuka+di+kalukku

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

- 6. Terlaksananya diseminasi informasi melalui pembuatan spanduk/baliho informasi hari besar Nasional dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju sebanyak 8 publikasi
- 7. Terpublikasinya kegiatan Kepala Daerah dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju sebanyak 261 kali selama Tahun 2025 melalui media

sosial dan website Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

Tabel 3.15
Laporan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah
Melalui Media Sosial
dan Website Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Publikasi	Keterangan
1.	Januari	17	
2.	Februari	21	
3.	Maret	50	
4.	April	34	
5.	Mei	20	
6.	Juni	13	
7.	Juli	0	
8.	Agustus	39	
9.	September	16	
10	Oktober	17	
11.	November	12	
12.	Desember	22	
	Total	261	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

8. Terlaksananya kerjasama media online sebanyak 11 kali kerjasama menghasilkan 165 rilis berita selama satu tahun, dan media cetak sebanyak 4 kali kerjasama menghasilkan 4 rilis berita selama satu tahun, ditambah dengan pembuatan Video Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebanyak 1 kali.

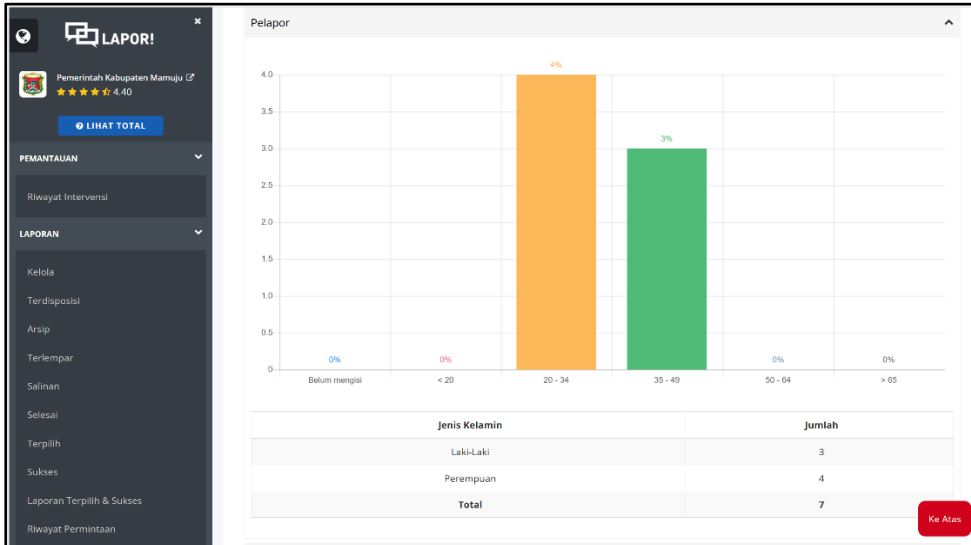
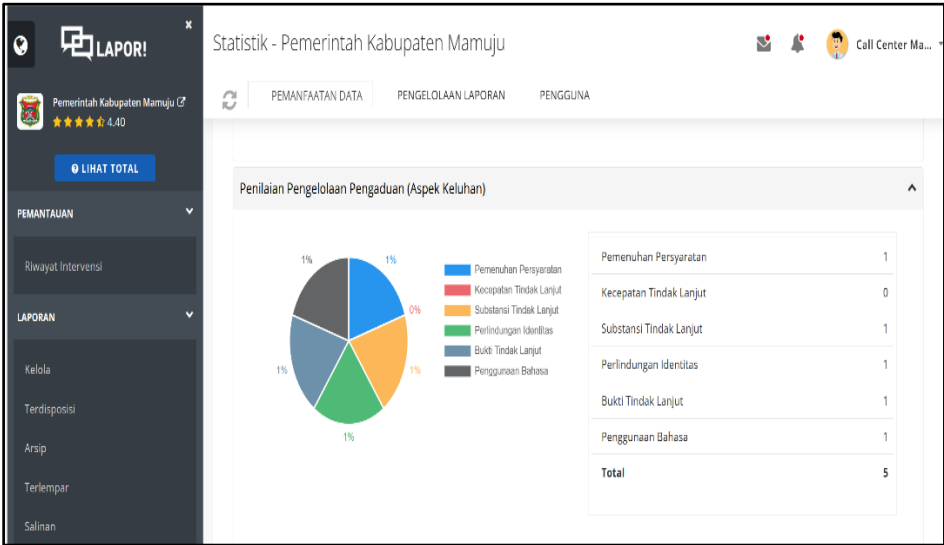
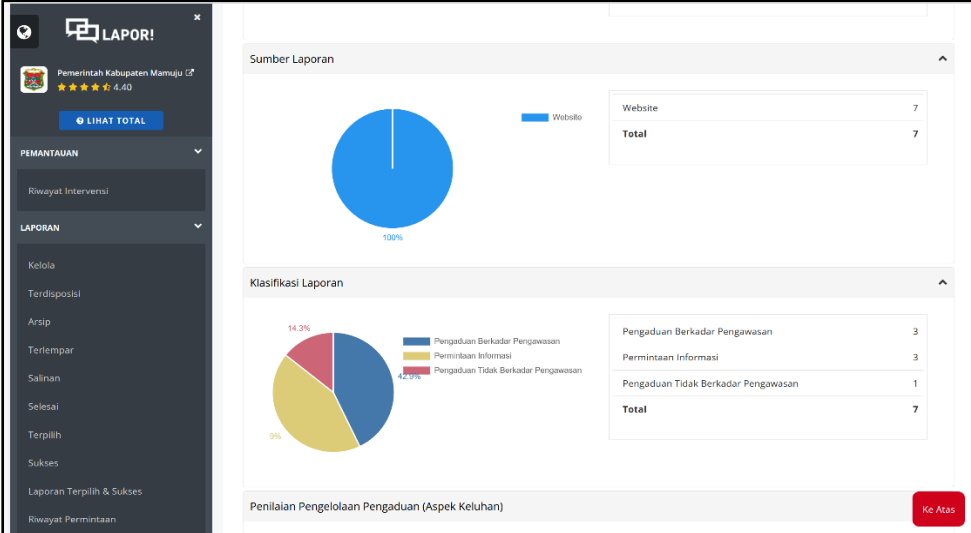
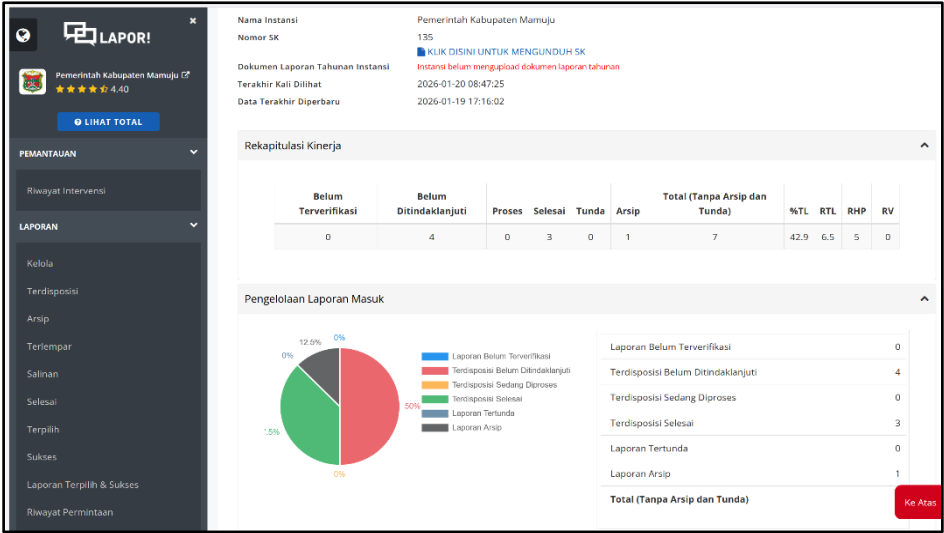
Tabel 3.16
Jumlah Kerjasama Media Cetak dan Media Online
Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju Tahun 2025

JENIS MEDIA	NO	KERJA SAMA	NAMA MEDIA	TANGGAL/ BULAN
MEDIA CETAK	1	Publikasi Media Cetak	Radar Sulbar	14 Januari
	2	Publikasi Media Cetak	Radar Sulbar	16 Januari
	3	Publikasi Media Cetak	Sulbar Express	14 Januari
	4	Publikasi Media Cetak	Sulbar Express	16 Januari
MEDIA ONLINE	1	Publikasi berita/advetorial	Katinting	Januari
	2	Publikasi berita/advetorial	Sulbar Express	Februari
	3	Publikasi berita/advetorial	Sulbar Express	April
	4	Publikasi berita/advetorial	Radar Sulbar	April
	5	Publikasi berita/advetorial	Katinting	April
	6	Publikasi berita/advetorial	Sulbar Express	Mei
	7	Publikasi berita/advetorial	Radar Sulbar	Mei
	8	Publikasi berita/advetorial	Katinting	Mei
	9	Publikasi berita/advetorial	Katinting	September
	10	Publikasi berita/advetorial	Radar Sulbar	September
	11	Publikasi berita/advetorial	Sulbar Express	September
Pembuatan Video	1	Video Kaleidoskop	Setara Kreatif	mber s/d Dese

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

9. Pengelolaan layanan aduan masyarakat melalui LAPOR-SP4N sebanyak 7 aduan selama Tahun 2025, yang mana aduan tersebut telah terdistribusikan ke Perangkat Daerah (PD) yang menangani secara teknis. Beberapa Gambar mengenai kondisi aduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR-SP4N, sebagai berikut :

Gambar 3.1
Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N
Tahun 2025



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3.2.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 3.17
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,5	2,63
	Indeks IPS	1,9	Tidak Terlaksana

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Pada Sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya fasilitasi Zoom Meeting Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) serta Perangkat Daerah sebanyak 113 Kegiatan selama setahun.

Tabel 3.18
Laporan Rekapitulasi Fasilitasi ZoomMeeting Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Januari	8	
2.	Februari	6	
3.	Maret	5	
4.	April	11	
5.	Mei	8	
6.	Juni	8	
7.	Juli	10	
8.	Agustus	11	
9.	September	11	
10.	Oktober	13	
11.	November	12	
12.	Desember	10	
	Total	113	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2. Tersedianya data wilayah Kabupaten Mamuju berdasarkan nama Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan nya dengan persentase 21,21 % yang masih dalam kategori BlankSpot.

Tabel 3.19
Data BlankSpot Wilayah Kabupaten Mamuju
Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jl. K.S. Tubun Nomor : 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511
Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

LAPORAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU MELALUI DISKOMINFOSIP TENTANG
BLANKSPOT DI KABUPATEN MAMUJU

A. Tabel Persentase Data Blank Spot Desa/ Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Persentase Blank Spot Area	Total Persentase/ Kecamatan
1	BONEHAU	Banuada	100,00%	18,78%
		Bonehau	10,00%	
		Buttuada	11,00%	
		Hinua	9,00%	
		Kinatang	8,00%	
		Lumika	14,00%	
		Salutiwo	5,00%	
		Mappu	6,00%	
		Tamalea	6,00%	
2	KALUKKU	Belang Belang	0,00%	7,60%
		Beru-Beru	0,00%	
		Guliling	0,00%	
		Kabuloang	0,00%	
		Kalukku	0,00%	
		Kalukku Barat	0,00%	
		Keang	0,00%	
		Pammulukang	0,00%	
		Pokkang	0,00%	
		Sondoang	25,00%	
		Uhaimate	39,09%	
		Sinyonyoi	0,00%	
		Bebanga	20,00%	
		Sinyonyoi Selatan	22,33%	
3	KALUIMPANG	Batu Makkada	100,00%	78,88%
		Kalumpang	16,45%	
		Karama	100,00%	
		Karataun	5,00%	
		Kondo Bulu	4,00%	
		Lasa'	100,00%	
		Limbong	100,00%	
		Makkaliki	100,00%	
		Polio	100,00%	
		Salumakki	100,00%	
		Sandapang	100,00%	
		Siraun	100,00%	
		Tumoga	100,00%	
4	KEPULAUAN	Bala Balakang	100,00%	100,00%
		Bala-Balakang Timur	100,00%	
5	MAMUJU	Bambu	0,00%	0,00%
		Batu Pannu	0,00%	
		Karampuang	0,00%	
		Tadui	0,00%	
		Binanga	0,00%	
		Karema	0,00%	
		Mamunyu	0,00%	
		Rimuku	0,00%	

6	PAPALANG	Batu Ampa	5,13%	2,70%
		Boda-Boda	4,00%	
		Bonda	0,00%	
		Papalang	0,00%	
		Salukayu	0,00%	
		Sisango	3,00%	
		Sukadamai	0,00%	
		Toabo	0,00%	
		Topore	0,00%	
7	SAMPAGA	Bunde	0,00%	10,00%
		Kalonding	4,00%	
		Losso	16,00%	
		Salubarana	0,00%	
		Sampaga	0,00%	
		Tanambuah	15,00%	
		Tarailu	0,00%	
8	TOMMO	Leling Utara	8,00%	4,04%
		Leling Barat	10,00%	
		Buana Sakti	0,00%	
		Campaloga	0,63%	
		Kakullasang	0,00%	
		Kalepu	0,00%	
		Leling	13,87%	
		Tamemongga	14,00%	
		Sandana	0,00%	
		Tamejarra	0,00%	
		Tommo	0,00%	
		Malino	0,00%	
		Saludengen	10,00%	
		Rantemario	0,00%	
9	SIMBORO	Botteng Utara	0,00%	0,56%
		Botteng	0,00%	
		Tapandullu	3,00%	
		Sumare	2,00%	
		Simboro	0,00%	
		Saletto	0,00%	
		Rangas	0,00%	
		Pati'Di	0,00%	
10	TAPALANG	Bela	100,00%	25,00%
		Kopeang	100,00%	
		Orobatu	0,00%	
		Rantedoda	0,00%	
		Taan	15,00%	
		Takandeang	9,00%	
		Tampalang	10,00%	
		Kasambang	0,00%	
		Galung	0,00%	
11	TAPALANG BARAT	Dayanginna	0,00%	
		Dungkait	40,00%	
		Ahu	0,16%	
		Labuang Rano	5,00%	
		Lebani	50,00%	
		Pangasaan	0,00%	
		Pasabu	3,00%	
12	Total Persentase Blank Spot	Tanete Pao	50,00%	21,21%
		101		

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3. Tersedianya data usulan bantuan internet untuk titik BlankSpot pada fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di 10 Kecamatan, yaitu 89 Titik untuk Fasilitas Pendidikan (SD/Sederajat dan SMP/Sederajat) dan Fasilitas Kesehatan 6 Titik.

Tabel 3.20
Usulan Titik Blank Spot
Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No.	Kecamatan/ Desa	Titik Lokasi Blank Spot	Layanan Pendidikan (SD/SMP)	Layanan Kesehatan (Puskesmas/R umah Sakit) *
1	Kecamatan Kepulauan Balabalakang			
2	Balabalakang Timur	-2.5387, 117.943	SD INPRES PULAU AMBO	
3	Balabalakang Timur	-2.4223 117.5935	SD NEGERI KECIL PULAU LABIA	
4	Balabalakang Timur	-2.4527, 117.654	SDN KECIL PULAU SELOANG	
5	Balabalakang Timur	-2,452, 117,6533	SMPN 1 P. Bala-Balakang	
6	Blalabalakang	-2.4593, 117.3755	SD NEGERI KECIL PULAU POPOONGAN	
7	Blalabalakang	-2.2205, 117.4142	SD NEGERI KECIL PULAU SABAKKATAN	
8	Blalabalakang	-2.7128157, 119.8176668	SDK. PULAU SAMATAHA	
9	Blalabalakang	-2.6846,118.8924	SD NEGERI KECIL PULAU SALISSINGAN	
10	Blalabalakang	-2.3646 ,119.4711	SDK. PULAU SABOEANG	
11	Blalabalakang	-2.7128157, 119.8176668	SDK. PULAU SAMATAHA	
12	Blalabalakang	-2.450, 117.983		PUSKESMAS SALISSINGAN
13	Kecamatan Sampaga			
14	TAMEMONGGA	-2.3115, 119.2102	SD INPRES KALEPU	
15	SALUDENGEN	-2.2359, 119.4103	SD NEGERI SALUDENGEN	
16	Kecamatan Bonehau			
17	LUMIKA	-2.4869, 119.367	SD INPRES LUMIKA I	
18	LUMIKA	-2.4722, 119.3772	SD NEGERI LUMIKA II	
19	LUMIKA	-2.5319, 119.3278	SDN KALABUAN	
20	MAPPU.	-2.4786, 119.3837	SD INPRES MAPPU	
21	BONEHAU	-2.5019, 119.3465	SD INPRES PABETTENGAN	
22	BONEHAU	-2.5048, 119.3472	SMP NEGERI 1 BONEHAU	
23	BONEHAU	-2.5355, 119.316	SD NEGERI TALONDO KONDO	

24	BONEHAU	-2.655830313509374, 119.19978376160552		PUSKESMAS BONEHAU
25	Buttuada	-2.662, 119.1955	SD INPRES KALLAN BARU	
26	Buttuada	-2.6482, 119.2361	SDN MAO	
27	Buttuada	-2.6384, 119.2179	SDN PARAKDANG	
28	Buttuada	-2.654458496820536, 119.19875379339516		PUSKESMAS BUTTUADA
29	Salutiwo	-2.5293, 119.3499	SD INPRES SALUTIWO I	
30	Salutiwo	-2.5307, 119.3418	SD INPRES SALUTIWO II	
31	Tamalea	-2.4812, 119.3356	SD INPRES TALONDOK	
32	HINUA	-2.5998, 119.6457	SD NEGERI HINUA	
33	HINUA	-2.5790062556226867 , 119.26913495443695		PUSKESMAS HINUA
34	Kinantang	-2.411, 119.5401	SD NEGERI KINATANG	
35	Kinantang	-2.6582, 119.4907	SDN PELOKOAN	
36	Buttuada	-2.6202, 119.2339	SD NEGERI PELOSIAN	
37	Buttuada	-2.609, 119.2533	SD NEGERI SALUENO	
38	Tamalea	-2.5457, 119.3011	SD NEGERI TAMALEA	
39	Kecamatan Kalumpang.			
40	Kalumpang	-2.4778, 119.4839	SD NEGERI KALUMPANG	
41	MAKKALIKI	-2.5083, 119.5583	SD NEGERI MARIRI	
42	MAKKALIKI	-2.5128, 119.5832	SDN MAKKALIKI	
43	Mappu	-2.4569 119.403	SDN SARURAN	
44	SANDAPANG	2.3317, 119.569	SDN SANDAPANG	
45	SANDAPANG	-2.3363, 119.5908	SD NEGERI PANASUAN	
46	SANDAPANG	-2.340426, 119.592861	SDN KAHALEANG	
47	LASA	-2.6437 119.6166	SDN Lasa	
48	BATU MAKKADA	-2.4295052, 119.6869413	SMPN 9 KALUMPANG	
49	BATU MAKKADA	-2.4004, 119.6829	SD NEGERI BOSOKAN	
50	BATU MAKKADA	-2.3966 119.6787	SDN B a u	
51	Limbong	-2,4495, 119.5614	SMPN 8 KALUMPANG	
52	Limbong	-2.4462, 119.569	SD NEGERI RATTEMENANGA	
53	Limbong	-2.4229, 119.5526	SDN Maliuko	
54	Siraun	-2.6062, 119.6267	SMP NEGERI 6 KALUMPANG	
55	Siraun	-2.5083, 119.5583	SD NEGERI MAPO	
56	Siraun	-2.4054284, 119.6108271	SD NEGERI PATTUNG	
57	Siraun	-2.5742, 119.6284	SD NEGERI PEKKARO	
58	Polio	-2,4181, 119.6039	SMP NEGERI 7 KALUMPANG	
59	Polio	-2.394, 119.6471	SD NEGERI RANTEPATA	

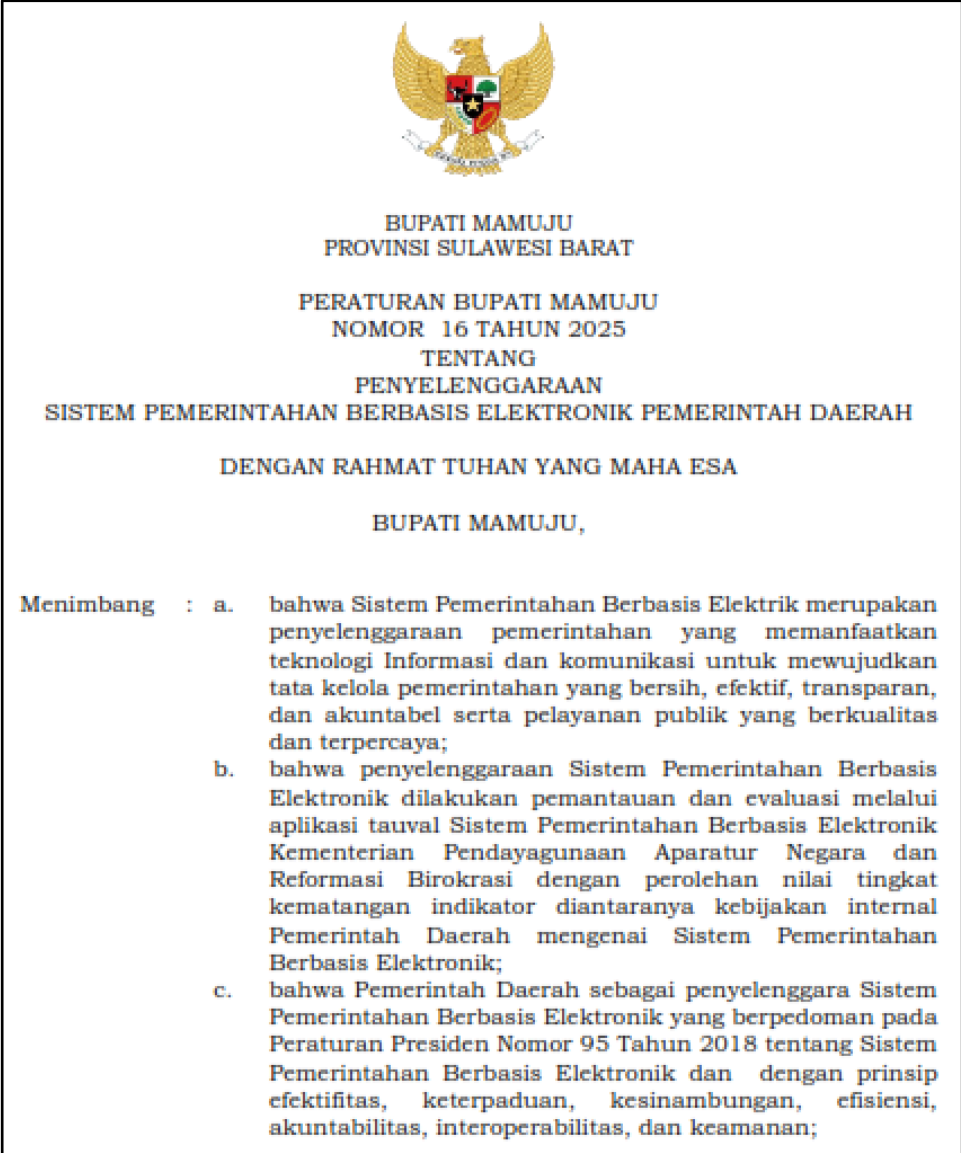
60	Karataun	-2.5391, 119.5211	SMPN 3 Kalumpang	
61	Karataun	-2.533, 119.5163	SD INPRES BATUISI	
62	Karataun	-2.5385, 119.5227	SD NEGERI BUALLO	
63	Karataun	-2.5919, 119.5692	SD NEGERI MALOLO	
64	Tumonga	-2.4188, 119.6043	SMP NEGERI 5 Kalumpang	
65	Tumonga	-2.4186, 119.605	SD INPRES TARARANG	
66	Salumakki	-2.5647, 119.6572	SMPN 4 KALUMPANG	
67	Salumakki	-2.5645, 119.6551	SD INPRES SALU	
68	Karama	-2.3742, 119.6195	SMP NEGERI 2 KALUMPANG	
69	Karama	-2.3753, 119.6157	SD INPRES TAMAN	
70	Karama	-2.3902, 119.6583	SD NEGERI PATUDAAN	
71	Kalumpang	-2,4802, 119,4862	SMP NEGERI 1 KALUMPANG	
72	Kondo Bulu	-2.5481, 119.4862	SD INPRES BULO	
73	Kondo Bulu	-2.5348, 119.4704	SD INPRES SUMUA	
74	Kecamatan Sampaga			
75	Salubarana	-2.320873, 119.155444	SMP S SALUKAYU IV	
76	Losso	-2.3190042, 119.1993337	SD INPRES LOSSO	
77	Kecamatan Papalang			
78	Boda Boda	-2.3927, 119.19	SD NEGERI BODA- BODA	
79	Kecamatan Kalukku			
80	Bebanga	-2.6529878, 119.0453015	SD NEGERI SAMAK	
81	Sondoang	-2.5818, 119.1324	SMP NEGERI 4 KALUKKU	
82	Sondoang	-2.5818, 119.1324	SD NEGERI RANTEDANGO	
83	Sondoang	-2.5764 119.1125	SD NEGERI PANAO	
84	Sondoang	-2.563, 119.088	SD INPRES SALUKAHA	
85	Keang	-2,647, 119.155	SMP NEGERI 5 KALUKKU	
86	Pamuluk kang	-2,6247, 119.0745	SMPN 7 KALUKKU	
87	Kecamatan Tapalang Barat			
88	Labuang Rano	-2.7875, 118.781	SMPN 3 Tapalang Barat	
89	Labuang Rano	-2.7733, 118.78	SD NEGERI TAPANGKANG TIMUR	
90	PANGASAAN	-2.7601, 118.8058	SMPN 4 Tapalang Barat	
91	Pasabu	-2.8061, 118.7666	SMP NEGERI 1 TAPALANG BARAT	
92	Dungkait	-2.853225479634648, 118.77401888208858		PUSKESMAS DUNGKAIT

93	Kecamatan Tapalang			
94	KOPEANG	-2.8503, 118.9	SMPN 4 TAPALANG	
95	KOPEANG	-2.8916, 118.9775	SD INPRES BELA	
96	KOPEANG	-2.8374, 118.9319	SD Negeri Rante Mario	
97	Bela	-2.829, 119.0171	SD NEGERI SALUMAYANG	
98	Bela	-2.8664, 118.9853	SD NEGERI SANDAUHAI	
99	Kecamatan Tommo			
100	LELING UTARA	-2.1729, 119.4613	SMPN 5 Tommo	
101	Leling	-2.2422, 119.425	SMPN 6 Tommo	
102	Leling	-2.2322262442208496 , 119.39500982248072		PUSKESMAS LELING
103	Sandana	-2,2338, 119.3847	SMPN 7 Tommo	
104	Tammejarra	-2.2899, 119.3019	SD INPRES TOMMO IV	
105	Tamemongga	-2.3151, 119.2423	SMPN 8 Tommo	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

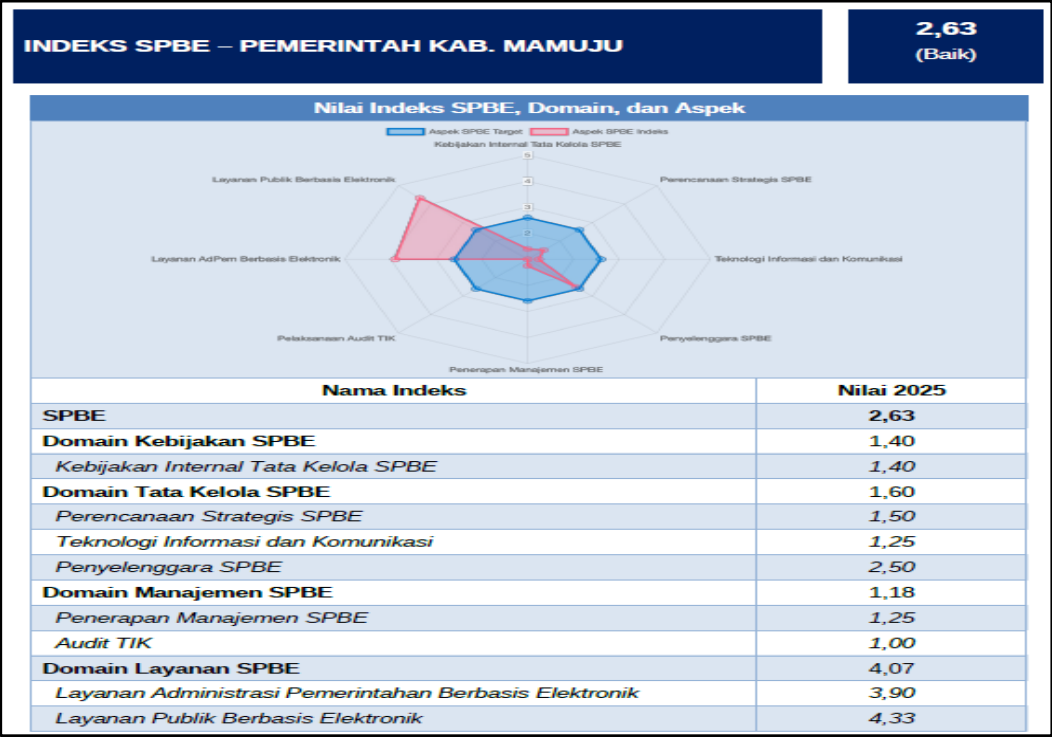
4. Terlaksananya Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah mendapatkan hasil dengan nilai 2,63 (Baik) dan sekaligus pengumpulan data terkait penggunaan instrumen 47 indikator dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
5. Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan server, website Pemerintah Kabupaten Mamuju serta aplikasi-aplikasi Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.
6. Tersedianya Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah.

Gambar 3.2
Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah



Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025

Gambar 3.3
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

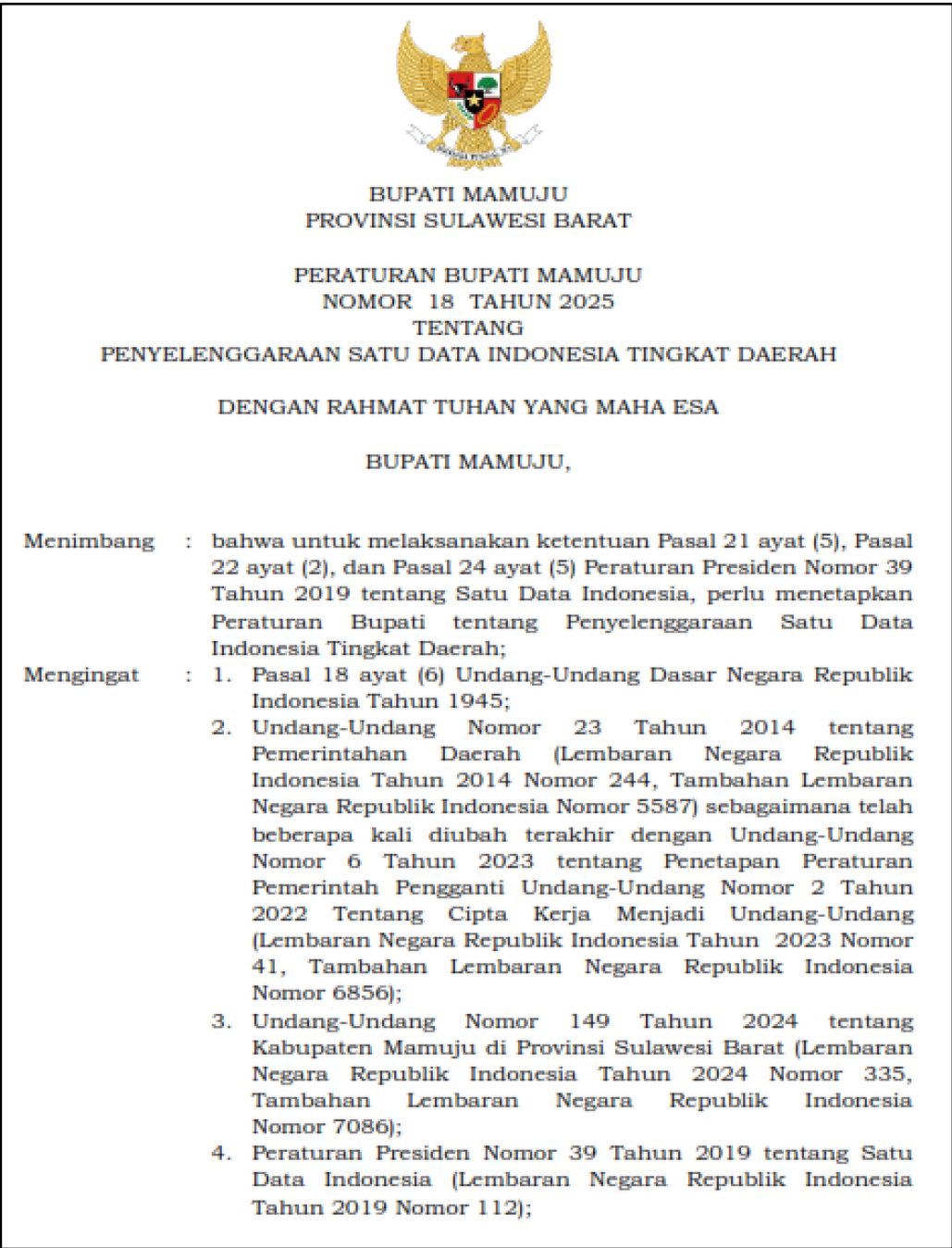


Sumber Data : KemenPAN-RB, 2025

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) bertujuan meningkatkan kualitas data statistik sektoral dengan rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah.

Gambar 3.4
Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

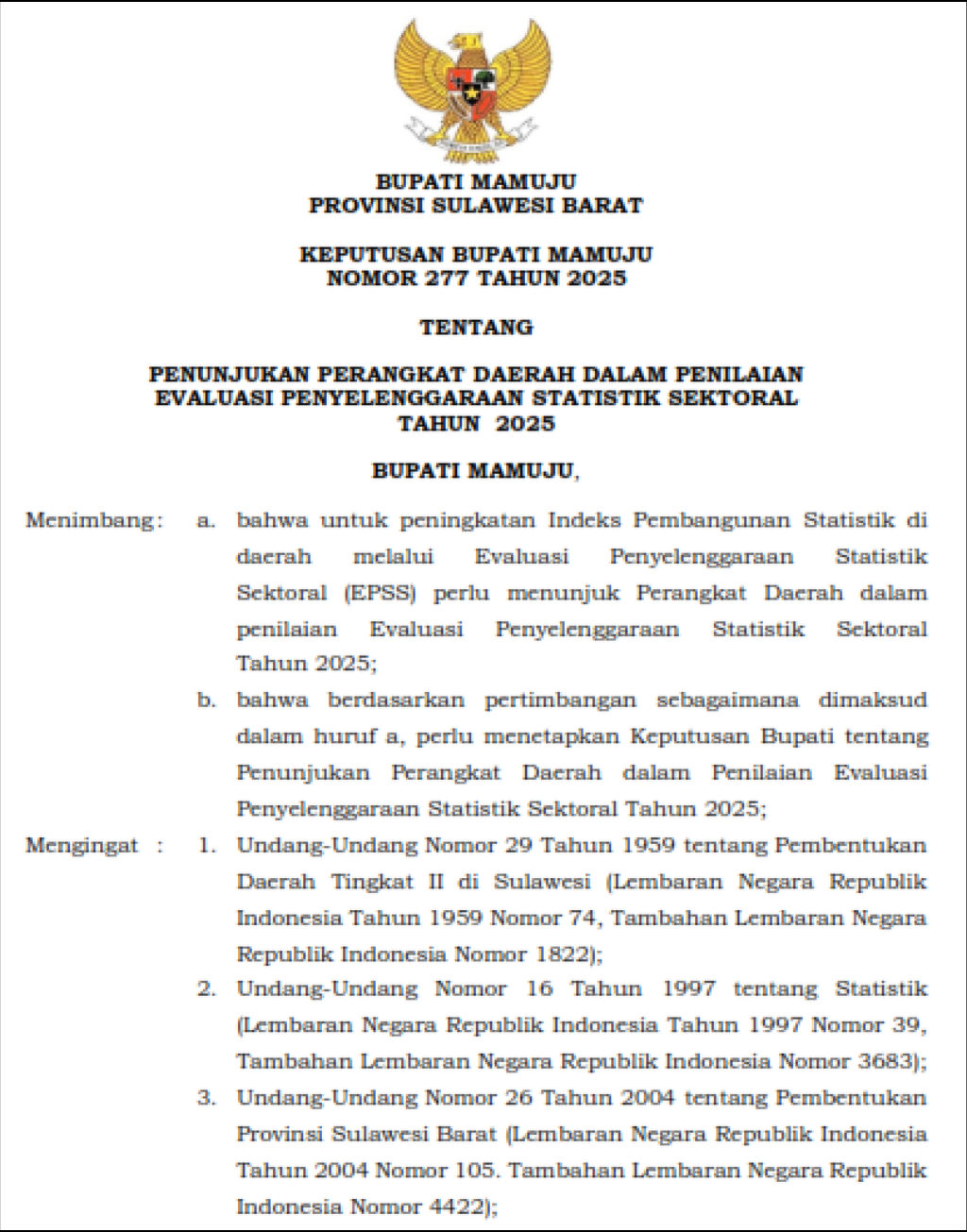


Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025

- 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Mamuju yaitu Pembinaan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- 3. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2025 ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perubahan proses bisnis EPSS di tingkat pusat,

akan tetapi tahapan pelaksanaan evaluasi tersebut tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan EPSS tahun depan yaitu dengan Penunjukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju sebagai Perangkat Daerah dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Tahun 2025, sesuai dengan SK Bupati Mamuju Nomor 277 Tahun 2025 dan Pengelolaan e-Walidata pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

Gambar 3.5
Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2025
Tentang
Penunjukan Perangkat Daerah Dalam Penilaian Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025



Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025

Gambar 3.6
Pembinaan Statistik Sektor
Oleh Pembina Data Kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025



Sumber Data : DISKOMINFOSIPSIP, 2025

3.2.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian

Tabel 3.21
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	67 %	92,99 %

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu

1. Terlaksananya aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) sampai dengan Tahun 2025 sudah terealisasi sebanyak 337 ASN yang telah memiliki dan memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersebut;

Tabel 3.22
Data Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai Tahun 2025

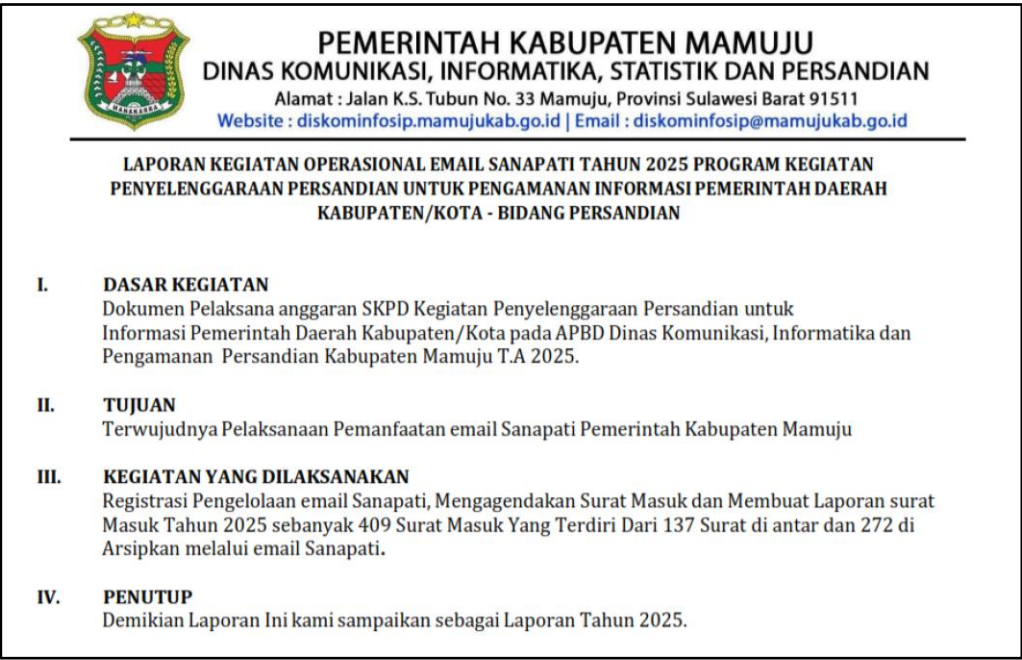
DATA AKTIVASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) TAHUN 2025
 YANG DILAKSANAKAN BIDANG PERSANDIAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN YANG SUDAH MELAKUKAN AKTIVASI	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	4	
2	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	14	
3	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	5	
4	DINAS PERHUBUNGAN	3	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33	
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	3	
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	30	
9	DINAS PERDAGANGAN	6	
10	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	4	
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	34	
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	
15	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	10	
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	3	
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	
18	DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2	
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIAHAN (BKPP)	3	
20	BADAN KESBANGPOL	10	
21	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4	
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	4	
23	DINAS KESEHATAN	4	
24	INSPEKTORAT	4	
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	5	
26	SEKRETARIAT DPRD	1	
27	DINAS SOSIAL	4	
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	22	
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	6	
30	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	18	
31	DINAS PERKEBUNAN	17	
32	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	4	
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	8	
34	KECAMATAN MAMUJU	19	
35	KECAMATAN SIMBORO	4	
36	KECAMATAN TAPALANG	0	
37	KECAMATAN TAPALANG BARAT	0	
38	KECAMATAN KALUKKU	6	
39	KECAMATAN PAPALANG	2	
40	KECAMATAN SAMPAGA	2	
41	KECAMATAN TOMMO	12	
42	KECAMATAN BONEHAU	3	
43	KECAMATAN KALUMPANG	0	
44	KECAMATAN BALA-BALAKANG	0	
45	PUSKESMAS RANGAS	42	
J U M L A H		337	

Sumber Data : DISKOMINFOSIPSIP, 2025

2. Terlaksananya pengelolaan Email Sanapati dimana Email Sanapati ini merupakan e-mail khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Realisasi surat yang masuk melalui email sanapati 409 kali penerimaan dan pengantaran selama Tahun 2025 sebanyak 137 kali.

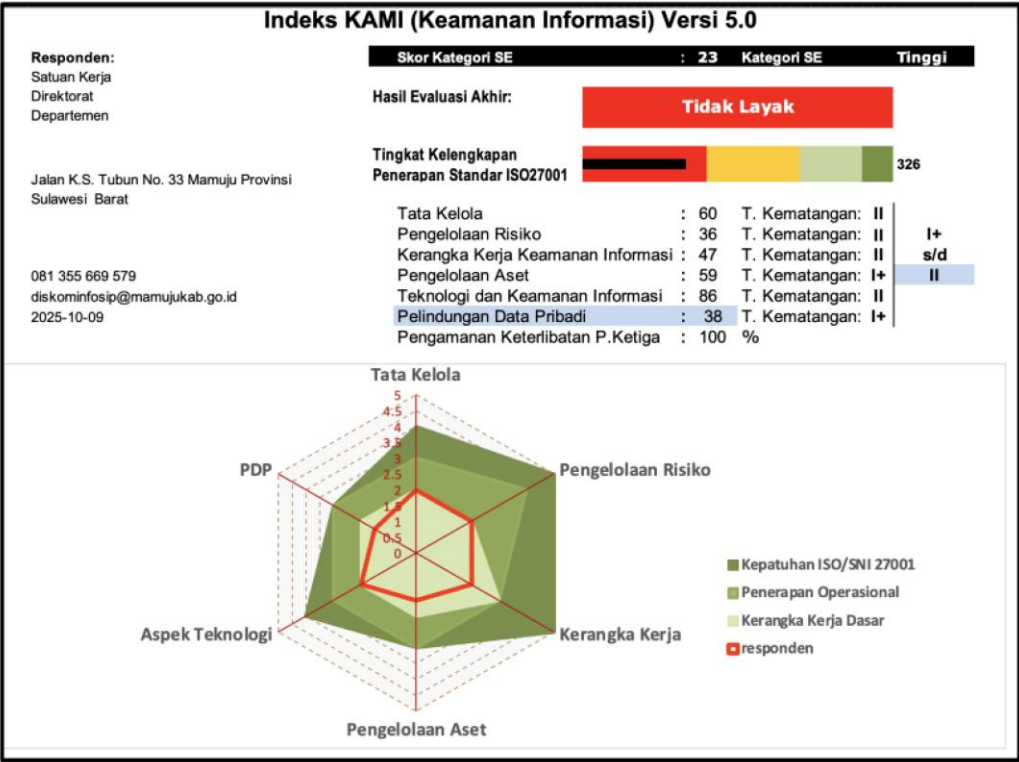
Gambar 3.7
Laporan Kegiatan Pengelolaan Email SANAPATI
Tahun 2025



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3. Terlaksananya Laporan Assesment Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) versi 5.0 Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia pada Tahun 2025, berdasarkan kelengkapan penerapan standar SNI/ISO 27001 sesuai kategori pada **skor 326**, dengn hasil evaluasi akhir masih berada pada level **Tidak Layak**.

Gambar 3.8
Laporan Assessment
Indeks Keamanan Informas (IKAMI) Versi 5.0
Pemerintah Kabupaten Mamuju
Tahun 2025



Sumber Data : BSSN-RI, 2025

4. Tersedianya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 360 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Mamuju

Gambar 3.9
Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 360 Tahun 2025
Tentang
Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS)
Kabupaten Mamuju

	 BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR 360 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN MAMUJU- (TTIS) BUPATI MAMUJU,
Menimbang	: a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman; b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian; c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pada Pemerintah Daerah, Bupati melakukan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber dan registrasi Tim Tanggap Insiden Kabupaten Tahun -TTIS 2025 untuk memberikan respons cepat dan terukur terhadap ancaman siber; d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan—sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju -TTIS.

Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025

3.2.4 Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima

Tabel 3.23
Analisis Hasil Capaian Sasaran
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD)
yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	A	Proses

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tepat waktu;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana ASN lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menunjang pelaksanaan tugas;

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi Anggaran Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang bersumber dari APBD sebesar Rp.3.667.347.397,- dengan realisasi sebesar Rp.3.359.615.111,-. Adapun alokasi Belanja Operasional Rp.3.575.601.397.- Realisasi Rp.3.271.328.211.- dan Belanja Modal Rp.91.746.000,- Realisasi sebesar Rp.88.286.900,-. Pagu dan realisasi anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2025 dan alokasi anggaran dan realisasi dari masing-masing program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PELAKSANAAN APBD TRIWULAN I - IV (JANUARI-DESEMBER) SETELAH PERGESERAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN												
NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN	
					KEUANGAN		FISIK					
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUA N	TTB			
					Rp	%	%	%	%			
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.178.750		23.745.959					432.791		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.249.000	0.39	13.864.515	97.30	0.38	97.30	0.38	384.485	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.828.750	0.13	4.823.184	99.88	0.13	99.88	0.13	5.566		
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2 Dokumen	1.933.000	0.05	1.913.980	99.02	0.05	99.02	0.05	19.020		
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.168.000	0.09	3.144.280	99.25	0.09	99.25	0.09	23.720		

NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
					KEUANGAN			FISIK			
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUAN	TTB		
					Rp	%	%	%	%		
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.895.762.986		2,842.876.304					267.176.647	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	2.784.532.287	72.93	2.517.411.191	90.41	68.64	90.41	68.64	267.121.096	Adanya Selisih Perhitungan Gaji Pegawai yang memasuki masa pensiun
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.096.000	2.16	79.074.486	99.97	2.16	99.97	2.16	21.514	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	9.925.800	0.27	9.891.763	99.66	0.27	99.66	0.27	34.037	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran

NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
					KEUANGAN			FISIK			
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUA N	TTB		
					Rp	%	%	%	%		
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		6		148.063.066					1.041	
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.297.000	0.17	6.295.959	99.98	0.17	99.98	0.17	1.041	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		148.788.400		148.063.066					631.696	
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Paket	4.081.600	0.11	4.073.500	99.80	0.11	99.80	0.11	8.100	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	5.879.600	0.16	5.607.000	95.36	0.15	95.36	0.15	272.600	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	792.000	0.02	756.350	95.50	0.02	95.50	0.02	35.650	
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	81.933.430	2.23	81.618.084	99.62	2.23	99.62	2.23	315.346	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		91.746.000		88.286.900					3.459.100	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	91.746.000	2.50	88.286.900	96.23	2.41	96.23	2.41	3.459.100	Selisih Perhitungan Spj

NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
					KEUANGAN			FISIK			
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUAN	TTB		
					Rp	%	%	%	%		
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		248.763.870		235.458.248					13.305.622	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	213.878.000	5.43	200.574.649	93.78	5.47	93.78	5.47	13.303.351	Realisasi Kegiatan Belanja Air, Listrik Dan Internet Sudah Sesuai Dengan Pemakaian Bulanan Sehingga Terdapat Selisih Anggaran
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	34.885.870	0.95	34.883.599	99.99	0.95	99.99	0.95	2.271	

NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
					KEUANGAN			FISIK			
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUA N	TTB		
					Rp	%	%	%	%		
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		75.217.192		72.182.925					1.868.830	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	29.331.550	0.80	28.747.720	98.01	0.78	98.01	0.78	583.830	Realisasi SPJ Sudah Sesuai Target
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Jenis	4.450.000	0.12	3.165.000	71.12	0.09	71.12	0.09	1.285.000	
7.3	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	2.335.000	0.06	2.335.000	100.00	0.06	100.00	0.06	-	

NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
					KEUANGAN		FISIK				
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUAN	TTB		
					Rp	%	%	%	%		
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6	12
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		174.307.740		164.768.282					9.539.458	
1.1	Relasi Maedia	12 Dokumen	85.802.740	2.34	1.836.700	99.92	2.34	99.92	2.34	70.859	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran
1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	60 Komunitas	22.179.500	0.60	25.624.000	86.19	0.52	86.19	0.52	3.063.267	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran
1.3	Pelayanan Informasi Publik	12 Laporan	2.361.500	0.06	21.310.800	15.31	0.01	15.31	0.01	2.000.000	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran
1.4	Diseminasi Informasi	100 Persen	23.336.000	0.64	310.000	82.97	0.53	82.97	0.53	3.974.332	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran
1.5	Penyusunan Konten	12 Laporan	40.623.000	1.11	12,913,000	98.94	1.10	98.94	1.10	431.000	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran

NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
					KEUANGAN		FISIK				
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUAN	TTB		
					Rp	%	%	%	%		
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6	12
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA										
1	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		87.920.970		87.521.169					399.801	
1.1	Koordinasi pengelolaan Data dan informasi	12 Laporan	44. 787.970	1.22	5.985.550	99.59	1.22	99.59	1.22	181.695	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran
1.2	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah	2 Dokumen	10.747.000	0.29	7.405.900	99.86	0.29	99.86	0.29	14.941	
1.3	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	12 Laporan	24.518.000	0.67	12.198.800	99.92	0.67	99.92	0.67	19.116	
1.4	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	12 Laporan	7.868.000	0.21	6.074.500	97.66	0.21	97.66	0.21	184.049	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran



NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
					KEUANGAN		FISIK				
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUAN	TTB		
					Rp	%	%	%	%		
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6	12
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		14.222.350		3.499.828					10.722.522	
1.1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	80%	2.826.000	0.08	2.765.000	97.84	0.08	97.84	0.08	61.000	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran
1.2	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	1 Kegiatan	11.396.350	0.31	734.828	6.45	0.02	6.45	0.02	10.661.522	Kegiatan tersebut tidak terlaksana karena Perbup SDI belum di sahkan
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		7.960.000		7.842.488					117.512	
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	7.960.000	0.22	7.842.488	98,52	0.21	98,52	0.21	117.512	Sisa Belanja Dari Efisiensi Anggaran

NO	URAIAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
					KEUANGAN			FISIK			
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUAN	TTB		
					Rp	%	%	%	%		
1	2	3	4	5 = 4/TA*100	6	7 = 6/4*100	8 = 7*5/100	9 = 7	10 = 9*5/100	11 = 4 - 6	12
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		9.593.450		9.516.184					77.266	
2.1	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	9.593.450	0.26	9.516.184	99.19	0.26	99.19	0.26	77.266	
J U M L A H			3.667.347.397	100	3.359.615.111	91.61	91.61	91.61	91.61	307.732.286	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju memiliki 5 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja. Dan dari 6 Indikator Kinerja tersebut 5 tercapai dan 1 tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju adalah masih kurangnya komitmen bersama dengan Perangkat Daerah Lain untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi secara umum.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Bersama antar Perangkat Daerah untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Monitoring dan Evaluasi PPID.
3. Kolaborasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak yang mendukung untuk terselenggaranya Transformasi Digital Pelayanan Publik.

4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mamuju.



*Pemerintah Kabupaten Mamuju
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian*



<https://diskominfosip.mamujukab.go.id>



@diskominfosip_mamuju



Diskominfosip Kabupaten Mamuju